

**MODEL SISTEM ZONASI DARI PERSPEKTIF TEORI
KEADILAN SOSIAL JOHN RAWLS
(Studi pada Sekolah Menengah Atas di Blitar Raya)**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-2
Magister Sosiologi**



Disusun Oleh :

**VINGGI OKTAVIARI
NIM : 201710270211009**

**DIREKTORAT PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2020**

**MODEL SISTEM ZONASI DARI PERSPEKTIF TEORI
KEADILAN SOSIAL JOHN RAWLS
(Studi pada Sekolah Menengah Atas di Blitar Raya)**

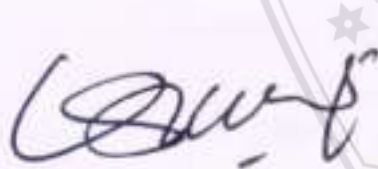
Diajukan oleh :

VINGGI OKTAVIARI
201710270211009

Telah disetujui

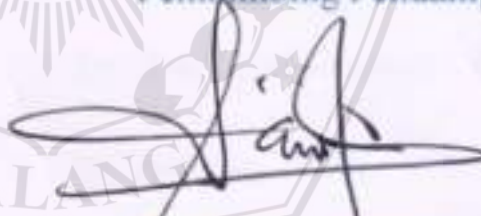
Pada hari/tanggal, Jum'at/ 24 Januari 2020

Pembimbing Utama



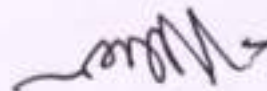
Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si.

Pembimbing Pendamping



Dr. Saiman, M.Si.

Ketua Program Studi
Magister Sosiologi



Prof. Dr. Ishomuddin, M.Si

Direktur
Program Pascasarjana



Prof. Akhisanul In'am, Ph.D

TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh :

VINGGI OKTAVIARI
201710270211009

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari/tanggal, Jumat 24 Januari 2020
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si.

Sekretaris : Dr. Saiman, M.Si.

Penguji I : Dr. Fauzik Lendriyono

Penguji II : Dr. HA Habib, MA.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **VINGGI OKTAVIARI**

NIM : **201710270211009**

Program Studi : **Magister Sosiologi**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul : **MODEL SISTEM ZONASI DARI PERSPEKTIF TEORI KEADILAN SOSIAL JOHN RAWLS (Studi pada Sekolah Menengah Atas di Blitar Raya)** adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 24 Januari 2020

Yang menyatakan,



VINGGI OKTAVIARI

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat, dan karunia-Nya sehingga Tesis dengan judul **Model Sistem Zonasi dari Perspektif Teori Keadilan Sosial John Rawls (Studi Pada Sekolah Menengah Atas di Blitar Raya)** sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Studi Magister Sosiologi pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang telah berhasil diselesaikan.

Selama penyusunan Tesis ini mulai dari perencanaan sampai penyelesaian penulisan laporan banyak pihak yang turut membantu baik moril maupun materiil. Oleh karenanya peneliti menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung terselesaikannya Tesis ini. Pihak-pihak tersebut antara lain:

1. Pertama kepada diri saya sendiri yang selalu sehat, sabar, dan bekerja keras dalam menyelesaikan Tesis ini.
2. Kedua orang tua dan keluarga yang secara ikhlas mendoakan, membimbing dan memberikan semangat demi terselesaikannya Tesis ini.
3. Akhsanul In'am, Ph.D selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Prof. Dr. Ishomuddin, M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Sosiologi
5. Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan terselesaikannya Tesis ini.
6. Dr. Saiman, M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah memberi motivasi dan arahan demi terselesaikannya Tesis ini.
7. Plt. Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur yang bersedia memberikan bimbingan dan arahan agar terselesaikannya Tesis ini.
8. Kepada Kepala UPT Tekomdik wilayah Jawa Timur beserta anggota yang bersedia memberikan data sebagai bagian dari kebutuhan penelitian ini
9. Serta orang-orang terdekat yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang telah mendukung dalam menempuh studi magister.

Penulis menyadari bahwa penelitian dan penulisan tesis ini masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat diharapkan penulis demi kesempurnaan penulisan tesis ini. Semoga penelitian tesis ini bisa memberi acuan terhadap penelitian selanjutnya.

Malang, 24 Januari 2020

Penulis,

Vinggi Oktaviari

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
 PENDAHULUAN	 1
Latar Belakang Masalah	1
Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian	2
LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA	3
Demokratisasi Pendidikan	3
Teori Keadilan Sosial John Rawls	4
Model Kebijakan Sistem Zonasi	4
Anatomi Penelitian Terdahulu	5
METODE PENELITIAN	8
Paradigma Penelitian	8
Jenis Penelitian	9
Pendekatan Penelitian	9
Lokasi Penelitian	10
Metode Penentuan Informan	10
<i>Subyek Penelitian</i>	11
<i>Sumber Data/Informasi Penelitian</i>	11
Tehnik Pengumpulan Data	12
Tehnik Analisis Data	12
Tehnik Validitas Data	14
HASIL DAN ANALISIS DATA PENELITIAN	15
Gambaran Umum Blitar Raya	15
Gambaran Umum Kota Blitar	15
Gambaran Umum Kabupaten Blitar	19
Proses Implementasi Model Kebijakan Pendidikan Sistem Zonasi di Blitar Raya	19
Model Kebijakan Pendidikan Sistem Zonasi Dari Perspektif Keadilan Sosial John Rawls	23
Dasar Pemikiran Teori Keadilan John Rawls	23
Model Sistem Zonasi di Blitar Raya dari Perspektif Teori Keadilan John Rawls	24
PENUTUP	
Simpulan	34
Saran	35
DAFTAR PUSTAKA	36

DAFTAR TABEL

1. Perbedaan Permendikbud Dari Tahun 2017 Hingga Tahun 2019 Tentang Sistem tentang PPDB	4
2. Anatomi Penelitian Terdahulu	5
3. Keadaan Geografi Wilayah Kota Blitar	16
4. Luas Wilayah Menurut Kelurahan	17
5. Jumlah Angkatan Kerja Menurut Kegiatan di Kota Blitar	18
6. Angka Partisipasi Sekolah Formal Menurut Kelompok Umur di Kota Blitar	18
7. Pembagian Zonasi Wilayah Blitar Raya	21
8. Jadwal dan Persyaratan Pendaftaran PPDB Online Blitar Raya Tahun 2019/2020	22



DAFTAR GAMBAR

1. Alur Analisis Data	14
2. Topografi Kota Blitar	15
3. Topografi Kabupaten Blitar	19



MODEL SISTEM ZONASI DARI PERSPEKTIF TEORI KEADILAN

JOHN RAWLS

(Studi pada Sekolah Menengah Atas di Blitar Raya)

Vinggi Oktaviari

vinggiokta@gmail.com

Dr. Tri Sulistyoningsih, M.Si (NIDN. 0022066401)

Dr. Saiman, M.Si. (NIDN. 0029096602)

Magister Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang

Malang, Jawa Timur, Indonesia

ABSTRAK

Sistem zonasi mulai diimplementasikan secara massal dari jenjang SMP dan SMA pada tahun 2019, namun mulai disosialisasikan untuk kemudian dilaksanakan pada jenjang SMP per-tahun 2017. Model sistem zonasi merupakan sebuah program untuk pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia yang masih terdapat ketimpangan antara masyarakat kota dan masyarakat pinggiran. Blitar Raya menerapkan model sistem zonasi masih memunculkan *side effect* dimana masih ada bentuk ketidakadilan bagi sebagian masyarakat Blitar sehingga memicu terjadinya gesekan di masyarakat terutama mereka yang mendapatkan keadilan dan masyarakat yang tidak mendapatkan keadilan. Penelitian dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan model sistem zonasi dari dua konsepsi umum dan khusus teori keadilan sosial John Rawls yang kontradiktif dalam pelaksanaan model sistem zonasi yang berazaskan keadilan sosial.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang berfokus untuk menguraikan model sistem zonasi dengan konsep keadilan sosial. Paradigma kritis sebagai perwujudan alat untuk mengubah institusi sosial, cara berpikir, dan perilaku masyarakat yang baik dengan didasarkan pada fakta ketimpangan keadilan sosial dalam pelaksanaan sistem zonasi di Blitar Raya. Metode observasi, wawancara, studi dokumentasi dipilih untuk menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan *thick notes* kemudian direduksi dan dimaknakan sesuai penafsiran penulis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan sosial terbagi menjadi dua konsepsi yakni umum dan khusus dimana dalam pelaksanaan sistem zonasi muncul ketimpangan antara masyarakat yang memperoleh keadilan dan ketidakadilan. Konsepsi umum dan konsepsi khusus dalam *justice as fairness* terwujud dalam prosentase kuota 15% bagi siswa dengan jalur prestasi, 5% untuk keluarga tidak mampu dan pindah tugas orang tua serta 80% jalur sistem zonasi. Sistem zonasi sebagai perwujudan keadilan sosial di Blitar Raya tergambar dari upaya pemerintah dalam menjawab demo dengan menaikkan kuota jalur sistem zonasi untuk mengurangi ketegangan dan gesekan pada saat Penerimaan Peserta Didik berlangsung.

Kata Kunci : Sistem Zonasi, Keadilan Sosial, *Justice as Fairness*

**ZONING SYSTEM MODEL FROM THE PERSPECTIVE OF SOCIAL
JUSTICE THEORY JOHN RAWLS**

(Study at High School in Blitar Raya)

Vinggi Oktaviari

vinggiokta@gmail.com

Dr. Tri Sulistyoningsih, M.Si (NIDN. 0022066401)

Dr. Saiman, M.Si. (NIDN. 0029096602)

Masters in Sociology University of Muhammadiyah Malang

Malang, East Java, Indonesia

ABSTRACT

Zoning system began to be implemented in bulk from junior high school and high school in 2019, but began socialized then to be implemented on a per-year junior high in 2017. Zoning system is a program to equalize the quality of education in Indonesia that there are still inequalities between town and in rural communities. Blitar Raya implement zoning system model still poses a side effect where there is still a form of injustice for some Blitar's people thus causing friction in the community, especially those who are denied justice and people who are not getting justice.

This study uses qualitative research with phenomenological approach that focuses on outlining the zoning system model with the concept of social justice. Critical paradigm as the embodiment of the tools to change social institutions, ways of thinking, and behavior are good with inequality based on the facts of social justice in the implementation of the zoning system in Blitar Raya. Method of observation, interviews, documentation studies have to analyze the data obtained by using thick pad then reduced and be interpreted by the author.

The results of this study indicate that social justice is divided into two general and specific conception of the exercise of the zoning system in which the emerging gaps between those who seek justice and injustice. General and special conception in justice as fairness embodied in the percentage quota of 15% for students with achievement lane, 5% for families as well as moving the duty of parents and 80% of the zoning system path. The zoning system as the embodiment of social justice in Blitar Raya drawn from the government's efforts in responding to demonstrations by raising quotas track zoning system to reduce tension and friction at the time of Acceptance of Students Progress.

Keywords: Zoning System, Social Justice, Justice as Fairness

PENDAHULUAN

Sistem zonasi layaknya sebuah kebijakan dalam dunia pendidikan yang terus mengalami dinamika implementasi. Implementasi sistem zonasi mengalami dua kali perubahan dan satu kali pembaharuan peraturan dimana Permendikbud No.17 Tahun 2017 tentang PPDB dianggap tidak sesuai untuk diimplementasikan secara massal untuk kemudian diterbitkan Permendikbud No. 51 Tahun 2018 tentang pelaksanaan sistem zonasi pada PPDB dan mengalami penyempurnaan melalui Permendikbud No. 20 Tahun 2019 tentang perubahan persyaratan sistem zonasi pada PPDB.

Implementasi Permendikbud No. 51 Tahun 2018 tentang sistem zonasi PPDB bersifat menggantikan atau memperbaharui Permendikbud No.17 Tahun 2017 dimana Permendikbud No.17 Tahun 2017 sudah harus digantikan karena PPDB tahun 2018 sudah tidak sesuai dengan proses pelaksanaannya. Sedangkan Permendikbud No. 20 Tahun 2019 bersifat melengkapi dan menyempurnakan Permendikbud No. 51 Tahun 2018 dengan pembaharuan prosentase kuota PPDB yang sebelumnya 90% untuk zonasi menjadi 80%, dan sebelumnya 5% untuk prestasi menjadi 10%, dan prosentase untuk pindah orang tua tetap hanya 5% saja.

Model sistem zonasi ini tentu tidak lepas dari sebuah dampak. Dampak dari suatu kebijakan mempunyai beberapa dimensi dan semuanya harus diperhitungkan ketika membicarakan evaluasi (Winarno 2016:197). Dimensi dari suatu dampak kebijakan bisa diidentifikasi menjadi lima bagian besar yakni; (a) Dampak sebuah kebijakan terhadap situasi atau orang yang terlibat di dalamnya (*intended and unintended consequences*), (b) Dampak sebuah kebijakan terhadap situasi atau kelompok di luar sasaran (*externalities or spillover effects*), (c) Dampak kebijakan pada dinamika sekarang dan fenomena yang akan datang, (d) Biaya yang dikeluarkan untuk membiayai program kebijakan publik, (e) Biaya tidak langsung oleh masyarakat akibat adanya kebijakan publik (Winarno, 2016: 198).

Ombudsman RI selaku bagian dari pemerintah sebagai tangan rakyat ke pemerintah pada tanggal 31 Juli 2017 dalam press rilisnya menjabarkan mengenai hasil temuan selama implementasi PPDB sistem real time online dan sistem zonasi (<http://www.ombudsman.go.id>), diantaranya: (1) Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 diterbitkan pada bulan Mei 2017 dimana waktunya terlalu dekat dengan pelaksanaan PPDB sehingga menyebabkan setiap daerah mengalami kesulitan menyesuaikan aturan. Di sisi lain, sebagian daerah sudah menerbitkan pergub/ perbup/ perwal atau juknis terlebih dahulu yang berakibat pada banyak sekolah kesulitan menyesuaikan aturan sehingga terjadi mal-administrasi. (2) Lambatnya penerbitan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 menyebabkan minimnya sosialisasi terkait perubahan Juknis PPDB kepada masyarakat luas. (3) Beberapa daerah menemukan fakta sistem online PPDB

tidak beroperasi dengan baik (server down) yang menyebabkan sekolah merasa terganggu dalam memberikan jawaban kepada masyarakat terkait permasalahan teknis ini. Hal ini berakibat pada potensi penyimpangan yang cukup tinggi karena tidak sesuai dari prinsip real time online itu sendiri yang bersifat terbuka, langsung dan cepat. (4) Sistem Zonasi dalam Pasal 15, 16 dan 17 Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, tidak memiliki indikator pasti tentang batasan wilayah calon siswa baru sebagai tolok ukur zonasi dengan pertimbangan demografi dan geografi wilayah. Hal ini berdampak pada kepala daerah dan kepala sekolah mengalami kesulitan dalam menentukan batas zonasi. Seperti yang terjadi di Blitar Raya dimana penentuan batas zonasi dengan menggunakan sistem geografi yang kurang mempertimbangkan demografi penduduk sekitar sehingga menyebabkan penyebaran siswa kurang merata dan terjadi irisan zona antara sekolah kabupaten dan sekolah yang berada di zona Kota dan kabupaten Blitar.

Dalam teori keadilan sosial menyikapi masalah yang muncul di masyarakat seputar implementasi sistem zonasi, Rawls (1999), menyatakan terdapat dua prinsip awal yang perlu diperharikan yakni pertama, *“each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for others”*. Prinsip ini diharapkan dapat mengubah pola pikir masyarakat tentang sebuah kebebasan. Kedua, *“social and economic inequality are to be arranged so that are both, (a) reasonably expected to be everyone’s advantage, and (b) attached to position and offices open to all”* (Rawls, 1999).

Prinsip kedua Rawls (1999) mengatakan ketika masyarakat telah tunduk dalam sebuah kebijakan dan membuat struktur sosial dasar (*basic structure social*), maka muncul pembagian kerja yang mengaturnya ke dalam dua prinsip yang disampaikan Rawls yang mana tidak ada pengurangan hak-hak dasar terkait kebebasan (*liberty*) dan hak politik (*political right*), seperti *freedom of speech and expression, freedom of conscience and thought, freedom to hold property, and rule of law* (Rawls, 1999).

Berangkat dari tingginya permasalahan yang muncul seputar sistem zonasi sebagai bentuk upaya pemerataan kualitas Pendidikan, peneliti berusaha untuk mencari bentuk keadilan sosial dari sistem zonasi menurut analisis Teori Keadilan dari John Rawls melalui penelitian yang berjudul **“Model Sistem Zonasi dari Perspektif Teori Keadilan John Rawls”** dengan fokus lokasi penelitian pada Sekolah Menengah Atas di Blitar Raya.

Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana model sistem zonasi dari perspektif teori keadilan sosial John Rawls? Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami tentang pelaksanaan sistem zonasi di Blitar Raya dengan analisis teori keadilan sosial John Rawls. Hasil dari penelitian ini diharap dapat memberikan sumbangan empirik yang bermanfaat baik secara teoritis maupun

secara praktis. Kegunaan secara Teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi ilmiah dalam upaya meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat dari kebijakan yang berazaskan keadilan sosial. Penelitian juga diharapkan dapat memberikan konsep keilmuan yang baru dalam pemahaman tentang model sistem zonasi sebagai upaya pemerataan kualitas pendidikan. Penelitian ini dapat menjadi landasan berpikir untuk penelitian selanjutnya. Selain manfaat teoritis, terdapat manfaat praktis dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan model sistem zonasi.

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

Demokratisasi Pendidikan

Penyelenggaraan sistem zonasi harus melibatkan masyarakat jika dikatakan sebagai bentuk demokrasi dimana masyarakat sebagai otoritas pengelola, dan institusi pendukung yang berperan lebih besar dari pemerintah pusat. Keterlibatan masyarakat dalam komite sekolah dan dewan pendidikan daerah merupakan kedudukan yang sangat krusial dalam pelaksanaan demokratisasi pendidikan. Peran yang sangat penting untuk dapat merumuskan perencanaan pendidikan baik secara makro maupun mikro restrukturisasi kebijakan dalam gagasan kurikulum.

Sebagai bentuk upaya dalam merealisasikan keberhasilan demokratisasi pendidikan, pemerintah melalui kurikulum di masing-masing sekolah telah berusaha untuk melaksanakan KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) dan dilanjutkan dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), dan proses penyempurnaannya pemerintah merumuskan Kurikulum 2013 yang kemudian disempurnakan menjadi Kurikulum 2013 revisi disesuaikan dengan kebutuhan dari sistem pendidikan nasional.

Teori Keadilan Sosial John Rawls

John Rawls mengidentifikasi keadilan sosial menjadi sebuah konsepsi yang secara langsung dihubungkan dengan pemahaman/ interpretasi masyarakat tentang hakikat masyarakat sebagai sebuah akomodasi sosial antar generasi. Pada konsep Rawls, masyarakat senantiasa berupaya untuk saling mencukupi kebutuhannya sendiri-sendiri walaupun pada realitanya dalam mewujudkan kerja sama sosial yang saling menguntungkan selalu rawan konflik kepentingan

Teori keadilan sosial menurut Rawls diidentifikasi sebagai sebuah bentuk masyarakat ideal yang diartikan sebagai bentuk masyarakat yang secara hakikat dapat diterima keberadaannya oleh masyarakat. Proses implementasi masyarakat ideal dapat diidentifikasikan menjadi; (1) setiap orang harus menerima dan sudah mengetahui bahwa orang lain menganut sebuah prinsip keadilan yang sama, (2) institusi sosial dasar yang ada sejalan dengan prinsip-

prinsip keadilan. Kedua prinsip ini sejalan dengan konsep utama Rawls *justice as fairness*, yang diartikan sebagai sebuah kesepakatan dari lapisan masyarakat yang rasional dan bebas (Rawls, 2006).

Model Kebijakan Sistem Zonasi

Mekanisme pendaftaran siswa baru atau yang sering disebut sebagai PPDB baik offline maupun online, keduanya menerapkan sistem baru yang diatur pada pasal 15 permendikbud no 17 tahun 2017, berisikan bahwa penerapan sistem zonasi di setiap sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah diharuskan menerima calon siswa yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah dengan jumlah maksimal 90 persen dari jumlah keseluruhan siswa yang diterima. Domisili calon siswa yang mendaftar di jalur PPDB harus dibuktikan dengan alamat pada KK yang telah diterbitkan minimal enam 6 sebelum PPDB dimulai. Radius zona terdekat diatur dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dimana telah harus menyesuaikan kondisi di daerah Blitar Raya.

Tabel 2.1 Perbedaan Permendikbud Dari Tahun 2017 Hingga Tahun 2019 Tentang Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru

Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017	Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 revisi Nomor 14 Tahun 2018	Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 (Penyempurnaan Permendikbud No.51 Tahun 2018)
Pelaksanaan PPDB berdasarkan kriteria dengan urutan prioritas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan zonasi 2. Usia 3. Nilai hasil ujian sekolah dan Surat Hasil Ujian Nasional 4. Prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui sekolah masing-masing 	Pelaksanaan PPDB: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penghapusan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) diganti dengan KIP dan penerimaan PKH 2. Domisili berdasarkan alamat KK yang diterbitkann minimal 6 bulan sebelumnya, sedangkan pada PPDB tahun 2019 diterbitkan pada alamat KK minimal 1 tahun sebelumnya. 3. Permen nomor 51 Tahun 2018 mewajibkan sekolah mengumumkan daya tampung dan jumlah rombel, pada permen nomor 14 Tahun 2018 hanya sebatas ketentuan perundangan (standar 	Pelaksanaan PPDB : <ol style="list-style-type: none"> 1. Siswa hanya boleh memilih satu jalur dari tiga jalur pendaftaran PPDB 2. Selain memilih jalur zonasi sesuai domisili, siswa boleh melakukan pendaftaran diluar zonasi dengan menggunakan jalur prestasi

	proses) 4. Prioritas satu zonasi asal pada permen Nomor 51 Tahun 2018, berbeda dengan permen Nomor 14 Tahun 2018 yang tidak ada prioritas (hal ini untuk menghindari pemalsuan surat domisili) 5. Penggunaan NIK pada permen nomor 51 Tahun 2018 yang sebelumnya menggunakan NISN pada Permen Nomor 14 Tahun 2018.	
--	--	--

Sumber: dokumentasi pribadi (Analisis Permendikbud tentang Sistem Zonasi)

Penelitian Terdahulu

Peneliti menyadari, dalam kajian yang dilakukan sekarang ini bukanlah penelitian baru, maka dari itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa kajian pustaka dari penelitian terdahulu. Dalam kajian ini, peneliti memfokuskan pada penelitian yang membahas tentang Penerapan sistem zonasi pada Sekolah Menengah Atas di Blitar Raya.

Tabel 2.2 Anatomi Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	<i>Do Better School Raise Housing Prices? Evidence from Paris School Zoning</i> Gabrielle Fack, Julien Grenet	Pada Sekolah Menengah Pertama di paris sistem kebijakna zonasi berdampak pada peningkatan harga rumah di sekitar sekolah yang memiliki kualitas bagus.	Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang disusun terletak pada dampak sosial peminatan pemilihan lokasi sekolah yang ‘dianggap’ mumpuni.	Focus utama pada penelitian ini pada dampak penjualan dan harga property di sekitar sekolah menengah, akan tetapi pada penelitian ini berfokus pada dampak psikologi dan sosial masyarakat bagi yang tidak mampu menyekolahkan putra-putrinya di sekolah favorite dan

				berkualitas.
2.	<p><i>Assessing the Success of School Cluster Zoning System in Senior Secondary Schools of Adamawa State, Nigeria</i></p> <p>Kabiru Mohammed Badau, Suleiman Anaf Yahya</p>	<p>Studi ini mengungkapkan bahwa tujuan ekonomi, pedagogik, administratif dan politik dari sistem zonasi gugus sekolah tidak tercapai di Negara Bagian Adamawa. Studi ini merekomendasikan antara lain bahwa pembuat kebijakan harus memperhatikan tujuan pedagogik melalui desain sistem zonasi gugus sekolah di sekolah menengah atas di Negara Bagian Adamawa</p>	<p>Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang disusun peneliti pada implementasi model kebijakan pendidikan sistem zonasi secara administratif.</p>	<p>Pada penerapan model sistem zonasi di Adamawa, Nigeria ini berfokus pada pengaruhnya terhadap ekonomi, pedagogik, administratif, dan politik. Sedangkan peneliti berfokus pada bidang sosial secara umum dalam menganalisis journal ini.</p>
3.	<p><i>Evaluation of Zoning Student Recruitment System in Year 2018</i></p> <p>Kiki Engga Dewi, Ririn Septiana</p>	<p>Penerapan sistem zonasi dalam PPDB pada 2018 memiliki kelebihan dan kekurangan. Sehingga banyak pihak yang dirugikan. Diantaranya adalah orang tua yang menyalahgunakan SKTM, calon siswa tidak dapat</p>	<p>Perlu untuk dianalisis karena dalam implementasi kebijakan sistem zonasi muncul permasalahan tentang ketidakadilan dan kurangnya kesempatan sehingga peneliti perlu untuk mengkaji lebih dalam tentang</p>	<p>Bentuk perbedaan antara penelitian dalam jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah fokus penelitian dimana dalam jurnal ini berfokus pada penerapan model sistem zonasi secara umum dan menyeluruh sedangkan pada penelitian yang</p>

		mendaftar di sekolah favorit di luar zona, dan sekolah juga dirugikan karena lebih sedikit siswa yang mendaftar.	dampak kesempatan dan keadilan yang merujuk pada teori Keadilan John Rawls.	dilakukan peneliti disini berfokus pada bentuk keadilan dalam model sistem zonasi sesuai dengan teori keadilan John Rawls.
4.	<i>Income Segregation between School Districts and Inequality in Students' Achievement</i> Ann Owens	Penelitian ini menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan lebih besar pada area sekolah metropolitan karena akses keterjangkauan lokasi sekolah.	Pertimbangan peneliti dalam menganalisis penelitian ini karena tema besar yang dikaji yakni sistem zonasi yang mengalami berbagai macam dampak, peneliti juga akan menggambarkan secara umum bagaimana implementasi sistem zonasi.	Sebagai pembanding dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada topik tentang dampak sistem zonasi terhadap tingkat perekonomian masyarakat yang merupakan siswa lulusan sekolah pinggiran dan metropolitan. Peneliti akan menggambarkan bentuk kesempatan dalam ranah keadilan yang dapat diperoleh untuk semua siswa.
5.	Implementasi PPDB Zonasi dalam Upaya Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Novrian Satria Perdana	Pelaksanaan PPDB Zonasi di Provinsi Sulawesi Tengah telah berhasil dalam upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan.	Terwujudnya konsep keadilan sosial dalam penerapan sistem zonasi dalam upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan di Sekolah Menengah Atas.	Penelitian ini hanya berfokus pada implementasi dampak dari kebijakan zonasi, sedangkan pada penelitian yang akan dilaksanakan menganalisis sistem zonasi bentuk keadilan sosial John Rawls

Sumber: analisis pribadi (2019)

Berdasarkan anatomi perbedaan penelitian di atas, maka penelitian menitikberatkan bagaimana penerapan sistem zonasi di Sekolah Menengah Atas sesuai dengan Permendikbud No. 20 Tahun 2019 sebagai hasil pembaharuan dari Permendikbud No. 51 Tahun 2018.

METODE PENELITIAN

Paradigma Penelitian

Paradigma diartikan sebagai sebuah cara pandang (*frame of thought*) yang digunakan oleh peneliti terutama ilmuwan sosial dalam memandang, mengkaji, menginterpretasi termasuk menyulam atribut-atribut sosial menjadi sebuah narasi ilmiah (Mahmud dalam Hakim, 2018:51). Kerangka berpikir menjadi hal yang sangat diperlukan dalam memahami fenomena yang dibatin oleh subyek penelitian. Poin penting dalam paradigma adalah bagaimana peneliti dapat memaknai dan menginterpretasi fenomena sosial yang menjadi penelitian. Sebagai ukuran, Denzin dan Lincoln (2005), mengidentifikasi paradigma sebagai "*basic belief system or world view that guides the investigator, not only in choices of method but in ontologically and epistemologically fundamental ways*" yang mana konsepsi ini dapat dipahami sebagai sistem keyakinan dasar beserta cara dalam memandang dunia yang membantu peneliti dalam mengamati fenomena sosial baik secara metode dan pemahaman fundamental, untuk mencari makna ontologis dan epistemologis.

Paradigma sebagai landasan berpikir utama dan sebagai kajian teoritik, penelitian ini tergolong dalam paradigma kritis (*critical paradigm*). Pendekatan pemikiran kritis menurut Horkheimer (1972: 210) berorientasi pada individu, spontanitas, rasionalitas, dan proses hubungan kerja. Sedangkan Adorno mengadopsi gagasan dasar filsafat yang terdapat upaya "universalitas", "objektivitas", atau "totalitas". (Wilson, 2007: 59). Konsepsi ini dipertegas oleh Littlejohn dan Foss dalam bukunya *Theories of Human Communication* yang menjelaskan paradigma kritis dalam tiga tradisi, yaitu; Pertama, tradisi ini memahami sistem yang sudah dianggap benar, struktur kekuatan, dan keyakinan atau ideologi yang mendominasi masyarakat melalui pandangan dan minat yang disajikan oleh struktur kekuatan.

Tradisi kedua berkaitan dengan ketertarikan para ahli dengan cara membuka kondisi-kondisi sosial yang menindas dan rangkaian kekuatan untuk menyampaikan bentuk emansipasi atau masyarakat yang lebih *liberal* dan berkecukupan dengan memahami penindasan dalam menghapus ilusi-ilusi ideologi dan bertindak mengatasi kekuatan-kekuatan yang menindas. Tradisi teori kritis yang ketiga lebih kepada upaya untuk menciptakan kesadaran untuk menghubungkan teori dan tindakan dimana teori tersebut bersifat normatif dan bertindak mencapai perubahan dalam kondisi-kondisi yang mempengaruhi masyarakat (Littlejohn dan Foss, 2011: 68-69).

Kecenderungan paradigma kritis lebih kepada perwujudan alat untuk mengubah institusi sosial, cara berpikir, dan perilaku masyarakat ke arah yang di yakini peneliti akan lebih baik. Memandang suatu fenomena dalam paradigma kritis harus didasarkan pada fakta lapangan yang perlu dilengkapi dengan upaya analisis serta argumentasi pribadi peneliti didukung argumentasi ahli. Sementara itu, menurut

Ellys Lestari Pambayun (2013), paradigma kritis bersifat realisme historis yang berarti sebuah realitas yang diasumsikan dan harus dipahami sebagai sesuatu yang plastis (tidak sebenarnya). Artinya realitas itu dibentuk sepanjang waktu oleh sekumpulan faktor, seperti: sosial, politis, budaya, ekonomik, etnik, dan gender; yang justru bahkan dikristalisasikan ke dalam serangkaian stuktur yang sekarang ini (hal yang tidak sesuai) dianggap sebagai sesuatu yang “nyata”, dan ini dianggap alamiah dan tetap (Pambayun, 2013).

Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam memperoleh data penelitian ini adalah dengan cara observasi, wawancara mendalam dan ikut serta dalam kehidupan sosial sehari-hari. Pengolahan data berupa data kualitatif yang tidak dapat dinilai dengan angka-angka, tetapi berupa informasi-informasi yang jelas dan nyata yang mampu mendukung maupun menyanggah asumsi penelitian ini atau dalam pemahaman Neumann (2014:167) merupakan *Soft Data* atau Data Lunak. Data Lunak ini merupakan informasi-informasi yang diperoleh dari informasi-informasi dari para informan yang telah dipilih sesuai dengan karakteristik yang ditentukan peneliti. Lebih jauh Neumann (2016:187), data lunak ini merupakan kata-kata, kalimat, foto dan simbol-simbol yang dimana dapat memicu peneliti untuk dapat melakukan interpretasi.

Secara konseptual pemahaman tentang penelitian Kualitatif menurut Amaratunga dkk (2002), *“conducted throug an intense and/or prolonged contact with a “field” or life situation”*. Huberman dan Miles (dalam Amaratunga, 2002) menjelaskan bahwa *“the situations are typically “bannal” or normal, reflective of the everyday life of individuals, groups, societies, and organisations”*. Lebih jauh Neumann (2016:188-189), menekankan pada kasus dan konteks serta makna budaya. Kondisi ini tidak terlepas dari relatifitas dari suatu kebudayaan, yang dimana satu budaya mempunyai keunikan masing-masing. Maka dari itu, dalam penelitian kualitatif memerlukan pemeriksaan secara terperinci.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan Fenomenologi. Pendekatan fenomenologi menurut Creswell (2009), *“phenomenological research is a strategy of inquiry in which their researcher indentifies the essence of human experiences about phenomenon as described by participants”*. Pemahaman ini dilanjutkan dengan metode dari Moustakas (dalam Cresswell, 2016), *“Understanding the lived experiences marks phenomenology as philosophy as well as a method, and the procedure involves studying a small number of subject through extensive and prolonged engagement to develop patterns and relationships of meaning”*. Konsepsi fenomenologi yang ditekankan peneliti lebih menempatkan peneliti benar-benar berada di luar dari masyarakat. Peneliti tidak boleh menyertakan

cara pandangnya akan realitas yang ada. Jadi pengalaman dan memori informan menjadi corak utama dalam hasil penelitian. Menurut Nieswiadomy (dalam Creswell, 2016) *“in this process, the researcher brackets or sets aside his or her own experiences in order to understand those of the participants in the study”*.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Blitar Raya yang mencakup Kabupaten Blitar dan Kota Blitar. Blitar Raya merupakan salah satu daerah yang menerapkan sistem zonasi yang terbagi menjadi empat zonasi. Zona satu berada di Kota Blitar yakni SMAN 1 Kota Blitar, SMAN 2 Kota Blitar, SMAN 3 Kota Blitar, dan SMAN 4 Kota Blitar. Zona dua berada di wilayah timur Kabupaten Blitar yakni SMAN 1 Talun, SMAN 1 Garum, SMAN 1 Kesamben. Zona tiga berada di wilayah selatan Kabupaten Blitar yakni SMAN 1 Sutojayan dan SMAN 1 Kademangan. Zona empat berada di wilayah barat Kabupaten Blitar yakni di SMAN 1 Ponggok dan SMAN 1 Srengat. Selain itu, sistem pagu rombongan belajar (rombel) juga dibatasi, yakni untuk SMA pagu rombel maksimal sejumlah 36 siswa dan untuk SMK pagu rombel maksimal sejumlah 72 siswa

Metode Penentuan Informan

Subyek Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada beberapa informan dan subyek yang dilakukan secara *purposive sampling* (Neuman, 2016:297). Orang yang menjadi informan diambil secara sengaja oleh peneliti, berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu yang dibutuhkan dalam penelitian. Langkah ini diambil dengan tujuan, melakukan pengamatan terlebih dahulu kemudian penentuan informan mengikuti informasi-informasi yang ada.

Kriteria subyek yang diharapkan adalah :

1. Merupakan praktisi pendidikan
2. Memahami tentang kebijakan pendidikan tentang PPDB
3. Pihak pelaksana sistem zonasi pada pelaksanaan PPDB
4. Memiliki kedudukan krusial sebagai penanggung jawab dan pelaksana sistem zonasi di wilayah Blitar Raya

Alasan pemilihan subyek di atas disebabkan informasi yang mereka berikan akan sangat membantu dalam analisis penelitian ini. Menurut Neuman (2016), terdapat 4 karakteristik yang harus dipenuhi seseorang agar dapat menjadi informan:

1. Seseorang yang mengetahui dengan baik budaya yang ada di daerahnya dan menyaksikan kejadian-kejadian yang terjadi di tempatnya.
2. Terlibat secara langsung dan mendalam dengan kegiatan yang ada di tempat penelitian

3. Anggota masyarakat yang dapat meluangkan waktu lebih bersama peneliti karena penelitian di lapangan membutuhkan waktu yang cukup lama dan dengan intensitas yang tinggi
4. Non-analitis, orang-orang yang tidak analitis akan tetapi mengetahui dengan baik situasi di daerahnya tanpa menganalisis suatu kejadian, merupakan informan yang baik.

Karakteristik di atas dijadikan acuan dalam menentukan informan hingga peneliti bertemu dengan *gatekeeper*, yaitu orang yang mampu mengenalkan peneliti kepada masyarakat di tempat penelitian (Creswell, 2018:131). *Gatekeeper* ini diperlukan karena keberadaannya mampu mengarahkan peneliti kepada orang-orang yang sesuai dengan penelitian. Lebih lanjut menurut Groenewald (2004), "*Gatekeeper is someone with the formal or informal authority to control access to a site*". Gatekeeper dapat dikatakan sebagai orang kunci yang dapat mendekatkan peneliti dengan informan-informan ataupun subyek penelitian karena kemampuan utamanya mengetahui secara pasti kondisi di lapangan.

Penentuan jumlah informan dan subyek yang diwawancara juga terbatas dengan menyesuaikan tujuan pengambilan data yakni pelaksana sistem zonasi pada pelaksanaan PPDB Tahun 2019. Hal ini disebabkan keterbatasan waktu, baik dari peneliti maupun dari masyarakat. Selain itu, penekanan peneliti dalam pengumpulan data dari informan yakni melalui wawancara terstruktur. Meskipun demikian sebagai pembanding digunakan pengamatan kepada kegiatan informan yang sesuai dengan fokus penelitian. Hal ini digunakan demi mengsinkronkan antara yang diucapkan informan dengan yang dilakukan informan dalam kesehariannya agar data yang diperoleh lebih valid.

Sumber Data/ Informasi Penelitian

Data Primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari para informan yang terlibat langsung dalam proses implementasi sistem zonasi dan terdampak yang secara *purposive* diarahkan kepada Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur dan Kepala Cabang Dinas Wilayah Blitar Raya dimana jumlah informan ini disesuaikan dengan kebutuhan peneliti.

Sumber data lain yang digunakan adalah sumber data sekunder yang merupakan data pendukung data primer yang berasal dari dokumen, catatan, berkas-berkas, jurnal ilmiah, jejak media sosial dan dokumen lain yang mendukung dan sesuai dengan penelitian ini. Data Sekunder ini dapat berupa data angka yang dapat membantu dalam penelitian ini sehingga data pendukung ini dapat menghasilkan data yang lebih akurat. Maka dari itu, data angka yang bersifat kuantitatif ini tetap diperlukan meskipun bukan sebagai data utama.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, studi literatur dan dokumentasi yang berhubungan dengan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data yang awal adalah pengumpulan data melalui studi literatur (Cresswell, 2018:146). Langkah selanjutnya adalah wawancara. Wawancara yang dilakukan peneliti berupa dua tipe wawancara yaitu wawancara sambil lalu, atau dengan mengobrol secara bebas dan wawancara mendalam (*indepth interview*). *Indepht interview* dilakukan kepada informan yang mempunyai pemahaman serta pengetahuan tentang sistem zonasi dan konsep keadilan sosial yang mana dilakukan peneliti secara berkelompok sehingga dalam proses wawancara ini dapat dilakukan dengan melakukan *Focus Group Discussion* (FGD). Menurut Bungin (2001) dalam FGD wawancara yang dialektis dengan individu-individu yang terlibat dapat memunculkan makna-makna yang hendak diteliti.

Teknik pengumpulan data lainnya adalah observasi (*observational surveys*) yang dilakukan oleh peneliti secara visual dan menggunakan seluruh indera perasa. Seperti mendengarkan cerita dari masyarakat dan mengamati tingkah laku masyarakat. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk observasi partisipatif yaitu bentuk pengamatan yang tak berstruktur atau informal dan ikut terjun dalam kegiatan masyarakat (Creswell, 2009). Teknik terakhir yakni *documentation* melalui jalan mengambil gambar dari hasil observasi maupun wawancara yang dilakukan terkait dengan fokus penelitian serta rekaman wawancara itu sendiri dipergunakan sebagai salah satu bukti dalam penelitian, dimana rekaman kemudian ditranskrip.

Tehnik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data-data kualitatif yang bersifat dinamis, fleksibel, dan bergantung pada suatu sistem nilai. Selain itu, data yang diperoleh pada akhirnya sangat beragam, sehingga yang diperoleh bukanlah data yang linear melainkan data-data yang berupa narasi yang mampu menciptakan beragam interpretasi. Selanjutnya, data tidak dimasukkan ke dalam laporan secara utuh, melainkan mengalami pereduksian data. Langkah ini dilakukan agar data yang diperoleh dapat fokus. Sebelum melakukan pereduksian data, peneliti juga melakukan pengelompokan data. Pengelompokan data ini disesuaikan dengan tema dan kategori-kategori yang disusun sedemikian rupa agar dapat menjawab pertanyaan peneliti.

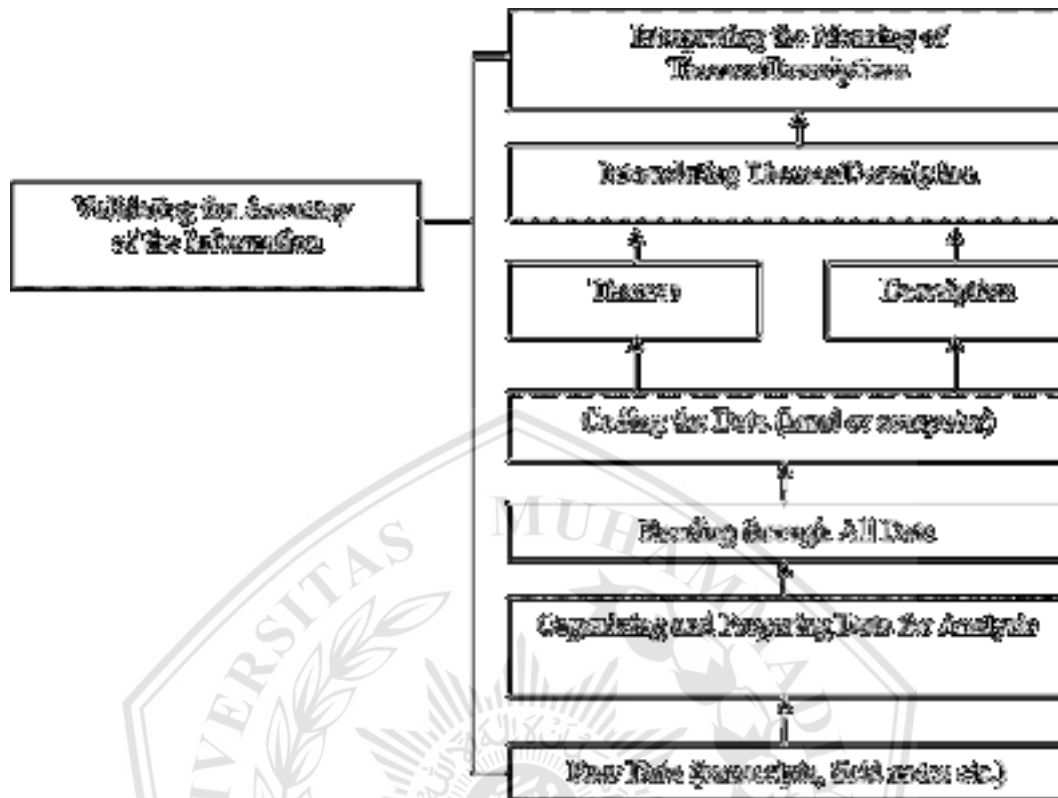
Data-data yang diperoleh dianalisis sebanyak dua kali, yaitu analisis permukaan dan analisis mendalam (Neuman, 2016:578). Analisis permukaan ini mengformulasikan asumsi dasar penelitian dengan data-data dari buku-buku serta observasi awal dan catatan lapangan peneliti. Kegunaan dari analisis awal ini untuk melihat latar belakang keluarga yang bersangkutan dan sebagai gambaran umum wilayah Blitar Raya. Sedangkan untuk analisis mendalam dengan memformulasikan

hasil analisis permukaan dengan temuan di lapangan melalui *indepth interview* dengan informan.

Indepth interview dilakukan ke beberapa informan yang dirasa memahami fenomena sosial yang terjadi. Karena pendekatan yang digunakan fenomenologi maka dalam melakukan analisis data ditekankan dengan menggunakan analisis fenomenologi yaitu pada penelitian ini menggunakan analisis refleksi fenomenologis. Menurut Van Manen (Dalam Cresswell, 2018:271) bahwa dalam penelitian fenomenologi bertujuan untuk melakukan refleksi dalam memaknai esensial dari suatu fenomena sehingga sumber data yang dapat digunakan dalam menangkap ekspresi dari informan dapat menggunakan rekaman percakapan, wawancara mendalam, laporan atau cerita harian, percakapan non struktur, respon dari masyarakat yang ditulis dalam catatan lapangan baik secara formal maupun nonformal.

Dalam analisis refleksi dalam prosesnya terdapat beberapa yang harus dilakukan yakni tahapan ruang yang dirasakan individu, maka di sinilah pentingnya untuk berinteraksi intensif dengan pelaksana sistem zonasi yang menjadi bagian penelitian dalam waktu tertentu. Poin berikutnya ialah kehadiran fisik yang diartikan bagaimana individu tersebut benar-benar mengalami. Selanjutnya adalah waktu, dimana harus disesuaikan dengan dimensi penelitian berlangsung. Tahap terakhir adalah relasi dengan orang lain yang pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dengan tema dan informasi yang diperoleh dapat beragam namun masih dalam jalur tema yang diteliti.

Gambar 3.1 Alur Analisis Data



Sumber: Cresswel (2009)

Tehnik Validasi Data

Informasi dari informan merupakan data mentah yang kemudian disesuaikan dengan penelitian yang ada melalui metode validasi. Dalam penelitian ini, proses validasi data penelitian menggunakan 3 tahap validasi. Tahap Pertama adalah validitas data melalui *Triangualisasi* data yaitu peneliti melakukan pengecekan pernyataan informan kepada pihak-pihak terdekat dengan informan dan melakukan pengamatan langsung (Neuman, 2016:186).

Langkah kedua, metode validasi yang digunakan dengan cara *prolonged observation*, yaitu peneliti berinteraksi intensif dan ikut serta dalam kegiatan PPDB di wilayah penelitian untuk dapat melakukan pengamatan serta observasi partisipasi terhadap sekolah dan lembaga pemerintahan yang sedang diteliti. Kondisi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengoptimalkan data yang dicari.

Langkah ketiga peneliti mencoba melakukan validasi dengan menggunakan *thick description* dimana proses ini diambil dalam *fieldnote* peneliti yang dilengkapi dengan gambar beserta rekaman wawancara yang ditranskrip. Di dalam catatan lapangan ini lebih banyak menangkap ekspresi informan ketika menerima pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti. Cresswell (2018), terdapat beberapa

titik utama dalam menganalisis informasi dari informan yang kemudian dibagi menjadi enam tahapan.

Pertama, mendeskripsikan pengalaman personal dengan fenomena yang sedang dipelajari yang diperoleh melalui sampel dari informan atau pengalaman pribadi. Tahap kedua, yaitu peneliti menyimpulkan pernyataan dari hasil wawancara awal dan referensi yang kemudian menjadi analisis dasar yang digunakan dalam menyusun pertanyaan yang mendasar untuk mencari pemaknaan. Tahap ketiga, pengelompokan unit informasi dan disesuaikan dengan unit tema. Tahap keempat, membuat model deskripsi yang mendukung pengelompokan makna dan informasi dengan bantuan *fieldnote*. Kelima, deskripsi yang ditulis disesuaikan dengan pertanyaan yang mampu memunculkan pemaknaan, serta terkait dengan konteks dan latar belakang fenomena yang terjadi. Tahap terakhir, menulis deskripsi reflektif atau deskripsi gabungan secara struktural dan tekstual.

HASIL DAN ANALISIS DATA PENELITIAN

Gambaran Umum Blitar Raya

Gambaran Umum Kota Blitar

Wilayah Kota Blitar merupakan wilayah terkecil propinsi Jawa Timur setelah Kota Mojokerto yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Blitar dan



Sumber: <http://satellite.gisindonesia.com/>

mempunyai kontribusi serta pergerakan yang tinggi. Hal ini berdampak pada transportasi dan penyediaan sarana transportasi dari dan ke arah Kota Blitar. Penyediaan sarana dan prasarana agar semakin meningkatnya tingkat pelayanan terhadap pergerakan barang dan jasa serta sektor pariwisata yang sejalan, maka akan ada peningkatan pelayanan di seluruh wilayah Kota

Blitar. Secara garis besar Kota Blitar dibatasi dengan beberapa kecamatan di masing-masing titik wilayahnya.

Berikut adalah keadaan geografi wilayah Kota Blitar:

Tabel 4.1 Keadaan Geografi Wilayah Kota Blitar

Keadaan Geografi		
A.	Letak	
1	Bujur Timur	: 112°14' - 112°28'
2	Lintang Selatan	: 8°2' - 8°8'
B.	Batas Wilayah	
	Sebelah Utara	: Kec. Nglegok dan Kec. Garum, Kab. Blitar
	Sebelah Timur	: Kec. Garum dan Kec. Kanigoro, Kab. Blitar
	Sebelah Selatan	: Kec. Kanigoro dan Kec. Sanankulon, Kab. Blitar
	Sebelah Barat	: Kec. Sanankulon dan Kec. Nglegok, Kab. Blitar
C.	Sungai	
	Kota Blitar dialiri Sungai Lahar	: sepanjang 7,84 Km
D.	Luas Wilayah	
	Kota Blitar memiliki luas sebesar	: 3.257,83 Ha (32,58 Km ²)
E.	Ketinggian dari permukaan air laut dan rata-rata suhu	
	Rata-rata ketinggian Kota Blitar	: 156 m dari permukaan air laut adalah
	Sedangkan suhu rata-rata Kota Blitar	: 29o C
	Sumber : BPS Kota Blitar	

Berdasarkan data BPS Kota Blitar (2018), Kota Blitar mencakup tiga kecamatan yakni Kecamatan Sananwetan, Kepanjenkidul, dan Sukorejo yang memiliki luas 32,57 km² dengan total keseluruhan 23.787 jiwa dengan prosentase wilayah terbesar ialah lahan pemukiman, perumahan, perkampungan dan lahan persawahan yang didominasi sawah irigasi.

Kota Blitar secara unsur kependudukan juga mengalami pola persebaran yang cukup signifikan dimana penyebarannya belum bisa merata di masing-masing kecamatan. Di Kepanjenkidul masih didiami mayoritas penduduk dibanding dengan kecamatan lain walau secara luas wilayah, Sananwetan lebih memiliki luas di atas Kepanjenkidul.

Tabel 4.2 Luas Wilayah Menurut Kelurahan

Luas Wilayah menurut Kelurahan/Total Area by Village		
Kecamatan/Subdistrict	Kelurahan/Village	Luas Wilayah/ Total Area
1. Sukorejo		9,93
	1. Tlumpu	1,02
	2. Karangsari	0,88
	3. Turi	0,51
	4. Blitar	1,33
	5. Sukorejo	1,47
	6. Pakunden	2,26
	7. Tanjungsari	2,46
2. Kepanjenkidul		10,50
	1. Kepanjenkidul	0,87
	2. Kepanjenlor	0,61
	3. Kauman	0,68
	4. Bendo	1,52
	5. Tanggung	2,23
	6. Sentul	2,68
	7. Ngadirejo	1,91
3. Sananwetan		12,15
	1. Rembang	0,84
	2. Klampok	1,53
	3. Plosokerep	1,25
	4. Karangtengah	1,80
	5. Sananwetan	2,13
	6. Bendogerit	1,95
	7. Gedog	2,65
Kota Blitar		32,58
Sumber: Bagian Tata Pemerintahan, Pemerintah Kota Blitar		
Source : Governance Section of Blitar Municipality Government		

Tabel tersebut menunjukkan luas terbesar di Kota Blitar ialah di Kelurahan Sananwetan, akan tetapi secara demografi di Kota Blitar yakni Kelurahan Kepanjenkidul yang memiliki angka kepadatan penduduk tertinggi dimana Kota Blitar selama kurun waktu enam tahun ke belakang mengalami kenaikan yang cukup fluktuatif dengan jumlah angkatan kerja yang bekerja mengalami kenaikan dan angkatan kerja yang menjadi pengangguran pun mengalami kenaikan.

Tabel 4.3 Jumlah Angkatan Kerja Menurut Kegiatan di Kota Blitar

Jumlah Angkatan Kerja Menurut Kegiatan di Kota Blitar, 2011-2015 dan 2018						
2018						
Uraian						
	2012	2013	2014	2015	2017	2018
Bekerja	63 854	64 373	65 402	72 650	74 752	75 618
Pengangguran Terbuka	1 671	2 581	2 852	2 085	2 922	3 202
Jumlah Angkatan Kerja	66 293	68 609	69 365	75 516	77 674	78 820
Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2012-2015 dan 2017-2018						

Apabila diperhatikan, jumlah angkatan kerja yang bekerja terhitung dari tahun 2012 hingga 2015 mengalami kenaikan yang pesat khususnya pada tahun 2014 ke 2015. Berbeda dengan tahun 2017 ke 2018 yang juga mengalami kenaikan namun kurang begitu signifikan. Jika ditinjau lebih jauh lagi, jumlah pengangguran terbuka juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dan angka kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2018. Apabila hal ini dikaji dengan pendekatan sistem model zonasi tentu juga memiliki pengaruh dalam penentuan pendidikan setelah SMA dimana jumlah angkatan kerja yang menjadi pengangguran mencapai angka tertinggi setelah jenjang SMP dan ini terjadi pada tahun 2017 sebagai tahun awal pelaksanaan sistem zonasi.

Beralih pada angka partisipasi sekolah khususnya pada jenjang SMA per-tahun 2018 pun mengalami penurunan dibanding jenjang sebelumnya.

Tabel 4.4 Angka Partisipasi Sekolah Formal Menurut Kelompok Umur di Kota Blitar

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal Menurut Kelompok Umur di Kota Blitar				
Number of School Participate by Aged Group in Blitar Municipality				
2018				
Kategori		APS Formal, 7-12 tahun	APS Formal, 13-15 tahun	APS Formal, 16-18 tahun
Category		Formal APS, 7-12 years old	Formal APS, 13-15 years old	Formal APS, 16-18 years old
1.	Laki-Laki	100,00	94,70	91,55
	Perempuan	100,00	100,00	87,23
2.	Kelompok Pengeluaran			
	40 Persen Terbawah	100,00	92,82	81,69
	40 Persen Teratas	100,00	100,00	89,28
	20 Persen Teratas	100,00	100,00	86,96
	Total	100,00	97,05	89,20
Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional Kor, Maret 2018				
Source : National Socio Economic Survey Kor, March 2018				

Peran sebuah sistem disini dirasa sangat berpengaruh khususnya di Kota Blitar selain *mindset* masyarakat yang masih belum lepas dari norma lama tentang wajib

belajar sembilan tahun yang ditambah dengan aturan baru terkait sistem zonasi dimana masyarakat kembali mengalami gegar budaya dalam ranah pendidikan dan sistem belajar. Dari data di atas, dapat dilihat bahwasanya dalam usia anak yang menginjak masa SMA mengalami penurunan prosentase dari angka 94,70% menjadi 91,55%.

Gambaran Umum Kabupaten Blitar

Kabupaten Blitar merupakan wilayah bagian dari Jawa Timur yang merupakan salah satu Kabupaten dari 38 Kabupaten/ Kota yang membagi habis wilayah Provinsi



Sumber: <https://earth.google.com/web/>

Jawa Timur yang berada di pesisir Samudera Indonesia dengan batas wilayah sebelah utara Kabupaten Kediri, Sebelah timur Kabupaten Malang, sebelah selatan Samudera Indonesia, sebelah barat Kabupaten Tulungagung dan posisi tengah dari Kabupaten Blitar itu sendiri ialah wilayah Kabupaten Blitar.

Kabupaten Blitar terletak pada $111^{\circ}40' - 112^{\circ}10'$ BT dan $7^{\circ}58' - 8^{\circ}9'51''$ LS yang kemudian dibagi menjadi dua wilayah yaitu wilayah Kabupaten Blitar Bagian Utara diidentifikasi sebagai dataran rendah dan dataran tinggi dengan ketinggian antara 105-349m dari permukaan air laut sedangkan yang termasuk Kabupaten Blitar Bagian selatan yakni Kecamatan Kanigoro, Talun, Selopuro, Kesamben, Doko, Wlingi, Gandusari, Garum, Nglegok, Sanankulon, Ponggok, Srengat, Wonodadi dan Udanawu (Wilayah Kabupaten Blitar data BPS, 2019).

Menurut data statistik Kabupaten Blitar (2019), hamparan Kabupaten Blitar diidentifikasi sebagai daerah dengan ketinggian rata-rata +100m di atas permukaan laut dengan enam wilayah yang termasuk kecamatan dibagi dalam kategori ketinggian > 300 m di atas air laut, yang termasuk di dalamnya yakni: Kec. Wates, Kec. Wonotirto, Kec. Doko, Kec. Gandusari, Kec. Nglegok dan Kec. Panggungrejo.

Proses Implementasi Model Kebijakan Pendidikan Sistem Zonasi di Blitar Raya

Blitar yang merupakan salah satu dari sebagian kota di Jawa Timur yang menerapkan model kebijakan sistem zonasi diatur dalam beberapa peraturan umum yang pada implementasinya peraturan-peraturan yang mengatur tentang sistem PPDB ini lebih dikerucutkan lagi. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi khususnya pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) mulai digulirkan pada tahun 2017 dengan mengalami beberapa kali perubahan dan pembaharuan. Pada Pelaksanaan PPDB Tahun 2019 sangat perlu untuk dilaksanakan secara prinsip terbuka, akuntabel, nondiskriminatif, objektif, dan berkeadilan agar

semua tujuan awal dari sebuah keadilan sosial bisa berjalan dengan baik maka dalam penyelenggaraan PPDB Tahun 2019/2020 perlu disusun Pedoman PPDB sebagai dasar acuan semua pihak yang terlibat melalui beberapa peraturan yang menjadi landasan utama implementasi sistem zonasi. Berikut merupakan landasan pokok yang mengatur pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi di Wilayah Blitar Raya (Juknis PPDB, 2019):

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 23 Tahun 2019 tanggal 17 Mei 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Timur;
3. Petunjuk Pelaksanaan PPDB Tahun 2019 SMA, SMK, dan SLB Negeri Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Blitar tanggal 27 Mei 2019.

Landasan tentang model sistem zonasi ini telah diputuskan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan per-tahun 2019 dan untuk implementasi model sistem zonasi itu sendiri dikembalikan kepada masing-masing institusi daerah yang lebih menguasai wilayahnya. Hal ini dituangkan dalam kebijakan daerah tentang implementasi model sistem zonasi yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Salah satu perwujudan model sistem zonasi yang dilaksanakan oleh masing-masing kepala daerah yakni penentuan jumlah zona dalam satu wilayah kabupaten/ kota yang pada penelitian ini ialah wilayah Blitar Raya yang ditetapkan menjadi 4 zona dimana untuk wilayah Kota Blitar semua kecamatannya dijadikan ke dalam satu zona yaitu zona 1.

Berikut pembagian zona yang ada di Kota/ Kabupaten Blitar:

Tabel 4.4 Pembagian Zonasi Wilayah Blitar Raya

ZONA	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH
1	Kota Blitar	SMA Negeri 1 Blitar
	- Kepanjenkidul	SMA Negeri 2 Blitar
	- Sukorejo	SMA Negeri 3 Blitar
	- Sananwetan	SMA Negeri 4 Blitar
2	Binangun	SMA Negeri 1 Talun
	Doko	SMA Negeri 1 Garum
	Gandusari	SMA Negeri 1 Kesamben
	Garum	
	Kesamben	
	Selopuro	
	Selorejo	
	Talun	
3	Wlingi	
	Bakung	SMA Negeri 1 Sutojayan
	Kademangan	SMA Negeri 1 Kademangan
	Kanigoro	
	Panggungrejo	
	Sutojayan	
	Wates	
4	Wonotirto	
	Nglegok	SMA Negeri 1 Srengat
	Ponggok	SMA Negeri 1 Ponggok
	Sanankulon	
	Srengat	
	Udanawu	
	Wonodadi	

Sumber: Wawancara dengan Kacabdin Blitar Bp. Trisilo, 2019

Proses penentuan zona di wilayah Blitar dilakukan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Blitar Raya bekerja sama dengan Kepala Sekolah dari setiap jenjang sekolah mulai dari SD, SMP, SMA dan SMK Negeri yang ada di Blitar Raya. Kegiatan musyawarah diharapkan dapat memudahkan implementasi kebijakan agar tidak ada bentuk ketimpangan. Hal ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mengimplementasikan model sistem pendidikan yang sesuai dengan aktualisasi prinsip keadilan sosial.

Penerapan model kebijakan sistem zonasi tertuang dalam peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2019. Dalam implementasi model sistem zonasi di masing-masing merupakan bentuk penerimaan peserta didik secara reguler yang mana secara khusus sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menurut surat edaran resmi dari kementerian pendidikan ada empat jalur utama yang dapat digunakan calon siswa untuk dapat mendaftarkan diri di sekolah yang dituju yaitu dengan jalur prestasi, perpindahan tugas orang tua, keluarga tidak mampu, dan jalur zonasi/ reguler. Namun, dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik pun dikembalikan ke masing-masing sekolah untuk kemudian membuat petunjuk teknis pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Pelaksanaan PPDB di Wilayah Blitar Raya sesuai dengan petunjuk teknis yang diberikan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur dan dalam pelaksanaannya menyesuaikan kondisi di Wilayah Blitar Raya itu sendiri. Seperti yang terjadi di SMA Negeri 4 Blitar yang tidak terpenuhi jumlah pagu sehingga harus ada kebijakan khusus yang diterapkan yaitu melalui seleksi administrasi offline agar jumlah pagu menjadi terpenuhi yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Wilayah Blitar Raya tetap mengikuti jadwal yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yakni sebagai berikut:

Tabel 4.5 Jadwal dan Persyaratan Pendaftaran PPDB Online Blitar Raya 2019/2020

NO	KEGIATAN	TANGGAL	JAM	TMP & KET
1	Pengambilan PIN/Tes Kesehatan	20 Mei – 20 Juni 2019	Jam Kerja	SMA/SMK Negeri
2	Pendaftaran Jalur Prestasi, Perpindahan Tugas Orang Tua, Inklusi, Keluarga Tidak Mampu			
	Pendaftaran	11 Juni – 13 Juni 2019	08.00 – 14.00 WIB	SMA/SMK Negeri Blitar Raya
	Verifikasi dan validasi	14 – 15 Juni 2019	–	Panitia SMA/SMK Negeri Blitar Raya
3	PPDB Jalur Zonasi/Reguler			
	Latihan PPDB Jalur Zonasi/Reguler	20 Mei – 8 Juni 2019	24 Jam	Internet Online
	Pendaftaran PPDB Jalur Zonasi/Reguler	17 – 20 Juni 2019	24 Jam	Internet Online
	Penutupan Pendaftaran PPDB Jalur Zonasi/Reguler	21 Juni 2019	00.00	Internet Online
	Pengumuman Hasil PPDB Jalur Zonasi/Reguler	21 Juni 2019	01.00 WIB	Internet Online

	Daftar Ulang PPDB Jalur Zonasi/Reguler	21 – 22 Juni 2019	08.00 – 15.00 WIB	SMA/SMK Negeri Blitar Raya
--	--	-------------------	-------------------	----------------------------

Sumber: Juknis dari Pemprov Jatim, 2019

Pelaksanaan PPDB tahun 2019 di Wilayah Blitar Raya berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Provinsi Jawa Timur. Kendala selama proses pelaksanaan pun bervariasi diantaranya sosialisasi penentuan titik zona dimana masih ditemukan beberapa siswa yang masih kurang memahami proses penentuan titik walaupun kegiatan sosialisasi dan uji coba telah dilakukan sebestumnya. Upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi hal ini pihak sekolah dibantu operator sekolah dan dari cabang dinas bersama-sama membantu calon siswa untuk penentuan titik. Hal ini menjadi sangat penting bagi pendaftar jalur zonasi karena menjadi pertimbangan utama bagi siswa untuk dapat diterima di sekolah yang dituju siswa.

Model Kebijakan Pendidikan Sistem Zonasi Dari Perspektif Keadilan Sosial

John Rawls

Dasar Pemikiran Teori Keadilan John Rawls

Lingkup pemikiran ataupun teori seorang filsuf tidak semata lahir dalam ruang hampa dimana seringkali teori ataupun pemikiran lahir sebagai kritik, pengembangan, perluasan atas teori dan tradisi pemikiran yang telah ada sebelumnya. Begitu juga halnya dengan pemikiran Keadilan Sosial John Rawls. Di sini, peneliti menulis secara singkat tradisi-tradisi pemikiran yang berkaitan dengan teori keadilan yang dicetuskan oleh John Rawls melalui tradisi politiknya yakni *liberalisme egalitarian*, tradisi *kontrak sosial* oleh John Locke, JJ. Rousseau, dan pandangan *utilitarianisme*.

Pertama, tradisi politik *liberalisme egalitarian* yang diartikan sebagai doktrin filsafat politik normatif yang diartikan sebagai seperangkat argumen moral mengenai justifikasi tindakan politik dan institusi-institusi. Rawls sendiri memahami liberalisme sebagai produk zaman Reformasi abad ke-16 di Eropa yang melahirkan pluralitas agama, berkembangnya negara modern dengan administrasi pusat yang menggeser kekuasaan raja, dan berkembangnya sains modern pada abad ke-17 (Rawls, 2006: 22-23).

Liberalisme menuntut masyarakat ditata secara netral dan adil tanpa acuan pada nilai dan kepercayaan. Masyarakat yang tertata dengan baik ialah masyarakat yang diatur dengan adil yang kemudian diartikan Rawls sebagai *well-ordered society* dimana Rawls mengatakan sebagai masyarakat yang tertata baik atau gambaran mengenai masyarakat ideal ialah apabila ia didasarkan pada prinsip moral dasar dan keadilan sosial adalah prinsip moral dasar. Para filsuf yang berada dalam tradisi ini antara lain Jurgen Habermas, John Rawls, Karl Otto Apel, dan sebagainya.

Dalam prinsip keadilannya, Rawls menempatkan persamaan dalam kerangka persamaan hak dan kebebasan fundamental yang kemudian diartikan menjadi “*liberalisme egalitarian*”, berbeda dengan liberalisme klasik karena dalam implementasi di masyarakat ini diatur menurut prinsip kebebasan semata yang terjadi justru ketidakbebasan, sementara jika didasarkan pada prinsip kesamaan saja yang pasti terjadi justru ketidaksamaan sehingga Rawls berupaya untuk menciptakan jembatan agar dapat disejajarkan antara ketidakbebasan dan ketidaksamaan.

Kedua, tradisi *kontrak sosial* merupakan teori yang apabila masyarakat mencapai *well-ordered society* maka akan muncul kesepakatan bersama dari semua orang mengenai apa yang adil dan tidak adil. Bagi Rawls, kontrak sosial digunakan Rawls untuk melegitimasi prinsip-prinsip keadilan sosial yang akan mengatur struktur dasar masyarakat agar pengaturan bisa efektif maka prinsip-prinsip itu harus diterima semua orang. Prinsip-prinsip keadilan Rawls didasarkan pada dua argumen dasar, *intuitif* dan *teoritik* atau *rasional* yang digunakan sebagai argumen rasional Rawls dalam membenarkan argumen *intuitif*. Kontrak sosial yang telah dimodifikasi oleh Rawls dalam teorinya dikenal dengan nama “*original position*” yang pada teori Rawls bersifat hipotetis bukan historis.

Ketiga, *Utilitarianisme* dan *Intuitionisme* dimana secara khusus, Rawls melihat teorinya sebagai suatu kritik terhadap teori-teori keadilan sebelumnya yang menurutnya gagal memberikan suatu konsep keadilan sosial yang tepat dimana kegagalan teori sebelumnya disebabkan oleh substansinya yang sangat dipengaruhi oleh *utilitarianisme* atau oleh *intuitionisme* dan hal ini dicatat pada kata pengantar *A Theory of Justice* (Rawls, 2006: 5) yang kemudian menjadi pandangan utama para ahli filsafat modern.

Berdasarkan teori-teori sebelumnya, Rawls berusaha membangun teori keadilan yang mampu menjembatani dan menjamin keadilan sosial (sebuah kritik atas bentuk utilitarianisme) dan sekaligus dapat dipertanggungjawabkan secara objektif (kritik atas intuitionisme). Rawls membangun sebuah teori keadilan sosial dalam perspektif demokrasi (tradisi politik liberalisme) agar keadilan sosial benar-benar menjadi bentuk adil bagi semua orang.

Model Sistem Zonasi di Blitar Raya dari Perspektif Teori Keadilan John Rawls

Model sistem zonasi digadang-gadang sebagai jembatan awal dalam mewujudkan sistem pendidikan yang berazaskan keadilan sosial dimana tujuan utama dari model sistem ini ialah memberikan kesempatan yang sama bagi setiap lapisan masyarakat dan menghilangkan konsep sekolah ‘unggulan’ dan sekolah ‘pinggiran’. Konsepsi keadilan sosial John Rawls dihubungkan langsung dari pandangannya tentang masyarakat sebagai bentuk kerja sama sosial berkelanjutan antar generasi dimana titik utamanya yakni kebutuhan untuk bersama itu lebih baik dibanding memenuhi kepentingan dari masing-masing diri.

Kendati ada kebutuhan dan kepentingan bersama yang memungkinkan adanya kerja sama sosial yang saling menguntungkan, masyarakat biasanya juga ditandai dengan adanya konflik kepentingan yang bermula dari perbedaan pandangan.

“gak ada. 1,2 KM kurang malahan jaraknya itu kalau disini. Jadi anak saya sekolah swasta. Sempat anak saya stres karna kan yang diterima itu danemnya padahal bagus itu 34 lho mbak. Pengennya kan ya negeri kan secara fasilitas juga memenuhi kan mbak kalau di negeri. Padahal danem segitu kan haruse anak bisa milih sekolahan lha ini malah gak dapet sekolahan karna yang lain lebih tinggi. Padahal anak saya itu sudah ikut bimbel macam-macam mbak supaya bisa masuk di SMA Negeri yang dipengen, tapi karna zonasi jadi malah masuk swasta, malah sama anak yang rumahnya dekat dengan SMA Negeri yang dimau itu.”
(Wawancara Bpk. Sarni (*disamarkan*), 2019)

Munculnya konflik kepentingan yang dialami oleh Bpk. Sarni tersebut menjadi pekerjaan utama bagi Rawls dalam menciptakan konsepsi keadilan yang seadil-adilnya tanpa ada yang merasa kurang mendapat keadilan.

“sebenarnya kalau takaran permasalahan itu lebih banyak terjadi pada jenjang SMP mbak, jadi kan SMP itu lebih penerapan zonasinya jadi SMP itu malah lebih lihai lho, contohnya ini yang banyak terjadi di kecamatan ini yaitu pemalsuan data KK caranya lewat numpang KK saudara sih biasanya. Kalau SMP bisa punya KK di saudara gitu jadi ujungnya nanti memudahkan masuk di SMA.”
(Wawancara dengan Bpk. Korip (*disamarkan*), 2019)

Munculnya konflik kepentingan di masyarakat ini tidak lepas dari sebuah sistem baru yang berbenturan dengan *mindset* alamiah masyarakat yang lekat dengan anggapan “sekolah unggulan” sehingga kecenderungan manipulasi data itu sangat tinggi di Wilayah Blitar Raya. Hal ini pun ditegaskan oleh Kepala Cabang Dinas Wilayah Blitar, beliau mengatakan bahwa masyarakat masih terkungkung dengan *mindset* lama sehingga sulit untuk diajak berkembang.

“Karena kondisi apa yang diharapkan pusat itu berbeda jauh dengan apa yang diharapkan masyarakat di daerah. Sebagai contoh, maunya pemerintah pusat itu kan untuk menyamaratakan kualitas pendidikan tapi tidak diimbangi dengan sosialisasi yang berkelanjutan. Nah ini kan menimbulkan kesenjangan dan ketimpangan di daerah utamanya sarana sekolah yang sangat terbatas.”
(Wawancara dengan Bpk. Trisilo Kacabdin Blitar Raya, 2019)

Permasalahan dalam konsep keadilan sosial timbul dalam kondisi yang disebut oleh Rawls sebagai proses dari *circumstances of justice* (Rawls, 2001: 153-154). Kondisi ini diartikan sebagai kondisi yang memungkinkan kerjasama dan mengharuskan perlunya prinsip keadilan yang mengatur pembagian hak dan kewajiban, keuntungan dan beban hasil kerja sama sosial secara adil kepada para warga masyarakat (Rawls, 2001: 154-155). Tingginya angka kesenjangan di masyarakat yang merupakan permasalahan dari model sistem zonasi memaksa

pemerintah untuk harus meninjau kembali sistem zonasi khususnya pada PPDB tingkat SMA dimana lembaga-lembaga sosial mendistribusikan hasil kerja sama sosial secara adil kepada warga masyarakat melalui perumusan permendikbud tentang model sistem zonasi revisi. Hal yang perlu digarisbawahi ialah konsepsi keadilan sosial Rawls dibangun sesuai dengan pandangannya tentang masyarakat ideal yang disebutnya dengan masyarakat tertata baik (*well-ordered society*) agar tercipta keadilan yang baik.

“kami ada kok datanya dari KPAI, dari Ombudsman juga ada kalau ungkapan yang disampaikan melalui demo kemarin itu kan sebenarnya sudah dijawab semua. Cuma mungkin melalui medsos semua orang berhak menyampaikan ketidakpuasan tapi itupun prosentasenya tidak terlalu besar dan hanya terjadi di kota-kota besar saja.”

(Wawancara dengan Wiharto selaku Tekomdik PPDB Jatim, 2019)

Aktualisasi keadilan sosial dalam takaran *well-ordered society* disini disikapi masyarakat dengan tetap berpedoman pada aturan baku apabila ingin menyampaikan keluhan kepada lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab sebagai pemangku kebijakan. Perwujudan keadilan dalam ranah lokal itu sendiri berdasarkan laporan yang diterima tidak begitu banyak dan bisa di-handle penuh oleh Ombudsman dan KPAI sehingga hal ini sejalan dengan konsepsi John Rawls tentang hakikat *well-ordered society* antara lembaga dan masyarakat bersinergi positif dalam menyikapi permasalahan yang muncul selama proses PPDB dengan model sistem zonasi.

Rawls dalam teori keadilannya mengidentifikasi masyarakat sebagai *well-ordered society* yang diatur secara efektif oleh sebuah konsep keadilan sosial yang dapat diterima oleh semua pihak di mana (1) “*each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for others*”, (2) “*social and economic inequality are to be arranged so that are both ...*” (Rawls, 1999: 5). Ini sejalan dengan gagasan utama teorinya yang disebut dengan *justice as fairness*, yakni prinsip-prinsip keadilan merupakan hasil kesepakatan dari orang-orang yang rasional, bebas, dan setara dalam situasi awal yang fair (Rawls, 2006: 14).

Wilayah Blitar Raya mengalami ketidamerataan sarana gedung sekolah. Kurangnya bangunan sekolah yang berada di tujuh kecamatan di Wilayah Blitar Raya dengan dua kecamatan sebagai wilayah irisan yakni Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Nglegok sehingga masyarakat di kecamatan ini mengalami *culture shock* dalam menentukan tujuan sekolah anak ketika menginjak Sekolah Menengah Atas sejak diterapkan zonasi dalam PPDB di tingkat SMA per-tahun 2017 di Wilayah Blitar Raya.

“Kalau di Wilayah Blitar itu sendiri kita memang mengalami kekurangan sekolah di dua kecamatan mbak. Kedua kecamatan itu yakni Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Nglegok dimana memang letak kedua kecamatan ini kalau kita pantau letaknya lumayan jauh dari SMA terdekat. Ya mbak tau sendiri kalau Nglegok dan Sanankulon itu “nylenteng” sekali tempatnya. Sehingga dalam penentuan zonasi, dua kecamatan ini masuk

dalam wilayah irisan yakni dua kecamatan ini bisa mendaftarkan putra/putrinya di SMA Kabupaten atau SMA Kota yang terdekat dengan titik lokasi rumahnya. Kita mengacu pada surat edaran yang diberikan oleh provinsi saja mbak.”

(Wawancara Trisilo Kacabdin Blitar Raya, 2019)

Kondisi ini tentu kurang adil bagi masyarakat Sanankulon dan Nglegok dan tujuh kecamatan lain di Wilayah Blitar Raya apabila diterapkan konsep keadilan sosial dalam penerapan sistem zonasi karena apabila dibandingkan dengan sistem PPDB tahun sebelumnya hal ini bukanlah sebuah perubahan dengan skema keadilan yang diharapkan oleh kecamatan yang terdampak sehingga perlu untuk diperhatikan lagi penyebaran sekolah di masing-masing kecamatan agar perwujudan keadilan sosial benar-benar dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan tidak hanya terasa bagi masyarakat pinggiran yang sudah tersedia bangunan sekolah.

Model kebijakan sistem zonasi merupakan jalan yang tepat untuk menyikapi fenomena ketidakadilan di Blitar Raya dimana dalam pelaksanaan PPDB di SMA Negeri muncul berbagai macam bentuk keadilan dan ketidakadilan yang berjalan beriringan.

“Iya, diuntungkan mbak dengan adanya zonasi ini, contohnya saya yang rumahnya dekat dengan sekolah lebih mudah masuk tanpa menggunakan nilai, udah gitu bisa menghemat waktu perjalanan dari rumah ke sekolah. Tapi ya menurut saya kadang juga enggak adil, kalo yang rumahnya deketkan semakin mudah tapi jika rumahnya jauh dipersulit. gitu sih mbak.”

(Wawancara siswa Zarani, 2019)

Keadilan sosial menurut teori keadilan sosial dengan perspektif John Rawls dari statement Zarani tersebut diartikan sebagai prinsip *differences of principle* dimana masing-masing memiliki perbedaan hak namun harus diatur agar kemudian mampu untuk disamaratakan.

Rawls secara khusus membagi prinsip keadilan sosial menjadi dua prinsip besar yang awalnya ada tiga prinsip kemudian ia melebur menjadi dua prinsip utama yang kemudian terbagi lagi menjadi dua konsepsi yakni konsepsi umum dan konsepsi khusus, diantaranya:

Konsepsi Umum. Konsepsi keadilan Rawls dengan dua prinsip keadilannya bertolak dari konsepsi umum teori keadilan. Oleh karena itu, perlu untuk dikaji dan dianalisis konsepsi umum tentang teori keadilan. Rumusan konsepsi keadilan umum yakni,

“Semua nilai sosial primer (kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan, dan dasar-dasar harga diri) harus didistribusikan secara sama (*equally*). Suatu distribusi yang tidak sama (*unequal*) sebagian atau keseluruhan nilai-nilai sosial tersebut hanya apabila hal itu bermanfaat menguntungkan semua orang.” (Rawls, 2007)

Sehingga untuk dapat dianalisis berdasar prinsip keadilan umum penting untuk ditarik garis tengah, diantaranya:

- a. Prinsip pokok keadilan sosial Rawls adalah *equality* atau persamaan.
- b. Persamaan dalam distribusi nilai-nilai sosial primer
- c. Ketidaksamaan dapat ditoleransi selama hal itu menguntungkan semua pihak.

Pada poin ketiga dapat dirumuskan bahwasanya dalam pelaksanaan PPDB tahun 2019 masih ditemukan berbagai bentuk penolakan dari masyarakat karena sistem ini dirasa sangat tidak adil karena menghilangkan hak dasar untuk bisa sekolah di tempat yang diinginkan.

“...Karena kebanyakan siswa yang terpilih melalui jalur zonasi menurut saya siswa nakal sehingga apabila di kelas terdapat anak yang rajin anak itu akan di beratkan misalnya dicontoh terus. Karena nanti dapat pengaruh jelek dari temannya dan bergantung pada temannya. Karena dengan adanya system zonasi ini orang tua tidak bisa memenuhi permintaan anaknya untuk bersekolah di sekolah yang diinginkan padahal orang tua juga mengharapkan hasil lebih yang nanti diperoleh untuk anaknya...”
(Wawancara dengan siswa Nidya, 2019)

Nidya merupakan siswa yang merasa sistem zonasi sebagai penghambat keadilan karena pada implementasinya sistem zonasi kurang bisa mewakili hak semua siswa yang ingin melanjutkan ke jenjang SMA Negeri. Input yang kurang maksimal menjadi alasan rendahnya kualitas ketika mengikuti kegiatan belajar mengajar sehingga Rawls mengidentifikasi gejala ini sebagai bentuk toleransi atas ketidaksamaan dan hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan untuk menguntungkan semua pihak.

Statement Nidya sebagai siswa yang dapat dikatakan terdampak sistem zonasi tersebut memang sampai hingga ke plt. Kepala Dinas Provinsi Jatim Bapak Hudyono, dimana beliau selaku PLT Kadinprov Jatim tahun 2019 pun mengakui masih banyaknya masyarakat yang menganggap model sistem zonasi ini tidak adil bagi sebagian masyarakat utamanya mereka yang sudah mempersiapkan Nilai UN agar bisa tinggi dan diterima di SMA Negeri yang menjadi pilihannya.

“Bukan laporan tapi kami di demo, intinya orang tua itu tidak setuju dengan sistem zonasi karena menganggap bahwa ini tidak adil, masak anaknya pintar gak bisa masuk ke sekolah ini, SMA komplek SMA favorite padahal ini konsepnya kan untuk meniadakan SMA favorite ...”
(Wawancara Hudyono plt. Kadinprov Jatim, 2019)

Rawls menilai fenomena ini sebagai bentuk usaha dalam memperjuangkan *equality* dimana Rawls menyampaikan, “*each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for others*”. Fenomena ini lebih jauh diidentifikasi Rawls ke dalam konsepsi yang lebih khusus yakni *freedom of conscience and thought* sehingga masyarakat selalu memiliki

kecenderungan untuk menyampaikan apa yang ada dipikirkannya apalagi hal tersebut berkaitan dengan pemilihan sekolah lanjut untuk anaknya.

Prinsip pertama atau lebih dalam konsepsi umum Rawls tentang keadilan sosial ini Rawls meleburkannya ke dalam konsepsi khusus. Dalam menyikapi gejala sosial di masyarakat, pemerintah pun mengambil tindakan dalam masa-masa PPDB dengan merevisi aturan 10% bagi jalur zonasi untuk dinaikkan menjadi 20% melalui permendikbud nomor 20 Tahun 2019 untuk kemudian dilanjutkan ke masing-masing daerah melalui surat edaran

“... oleh karena itu aturan kita perlunak khususnya zonasi Jawa Timur ya, siapapun yang tidak berada di jalur zonasi itu bisa masuk asal nilai UN tinggi. Nah kita kan kasih 20% untuk nilai UN yang bisa masuk ke sekolah luar zonasi, itu kan sudah adil.”

(Wawancara Hudyono plt. Kadinprov Jatim, 2019)

Efek langsung dari revisi tersebut tidaklah begitu besar karena masyarakat menganggap dengan prosentase 20% tersebut belum mampu mewakili suara dari masyarakat secara umum. Pada realitas ini Rawls menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah sangat tepat dalam menanggapi suara yang muncul dari masyarakat. Perkara masyarakat masih merasa kurang adil dengan adanya sistem zonasi tersebut, Rawls menganggap ini sebagai hal yang wajar karena pada dasarnya antara keadilan dan ketidakadilan itu harus berjalan beriringan agar konsep keadilan yang umum dapat dilaksanakan dengan optimal dan semua masyarakat merasa diuntungkan.

Jelas bahwa konsepsi umum di atas menunjukkan Rawls sebagai Egalitarian. Titik tolak prinsip keadilannya ialah *equality*. Tapi ia bukan seorang Egalitarianisme radikal, di mana ia juga menerima prinsip ketidaksamaan (*unequality*). Di satu sisi bahwa keadilan sosial adalah penerapan prinsip persamaan dalam masalah distribusi nilai-nilai sosial primer. Di sisi lain, Rawls mengakui bahwa bentuk ketidaksamaan dapat ditoleransi sejauh hal itu menguntungkan semua orang terutama golongan yang paling tertinggal. Secara umum dapat dikatakan, sekujur konsepsi keadilan Rawls pada dasarnya bergerak menyusur di antara sisi persamaan dan ketidaksamaan.

Mengangkat prinsip persamaan atau *equality*, Rawls berusaha menggabungkan diri ke dalam kubu sosialisme dalam konsep peraturan sistem zonasi dari menteri pendidikan, tapi disini Rawls tidak bermaksud menambah pengikut sosialisme melainkan hendak membangun teori alternatif dalam menyikapi utilitarianisme dalam konteks masyarakat demokratik konstitusional. Berbeda dari sosialisme yang hanya menekankan penerapan prinsip kesamaan dalam distribusi kesempatan dan kebebasan. Rawls menerapkan prinsip persamaan dalam distribusi nilai-nilai primer atau *primary goods*. Nilai-nilai atau nikmat primer dirumuskan Rawls sebagai semua nilai atau nikmat material maupun non-material, yang langsung maupun tidak langsung dapat memengaruhi kondisi kehidupan dan masa depan seseorang.

Nilai-nilai rasional yang dimaksud Rawls itu mencakup nilai ekonomi (pendapatan dan kekayaan) selain dari hak-hak dan kebebasan, kekuasaan dan kesempatan, kehormatan diri sehingga cakupan nilai yang dikaji oleh Rawls ialah bentuk keseluruhan sistem sosial. Keadilan sosial berarti kesamaan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, tapi juga kesamaan dalam hak-hak, kebebasan dan kesempatan, serta kesamaan dalam dasar-dasar kehormatan diri. Secara sederhana dan populer, keadilan sosial Rawls dapat dikatakan melampaui apa yang menjadi titik perjuangan sosialisme dan liberalisme yang kemudian melebur dan digabung menjadi satu.

"...ada image di masyarakat bahwa sekolah negeri itu terbaik dibanding swasta sehingga itu titik berkumpulnya tujuan sekolah menjadi sekolah favorite. Nah dari situ dibentuklah sekolah zonasi, dari sekolah zonasi itu harus ada sekolah unggul. Nah mereka merasakan masih ada disparitas antara sekolah negeri sehingga harusnya tiap kecamatan itu ada sekolah negeri. Lha ini kan gak ada, tapi kan ada sekolah negeri."
(Wawancara Hudiyono plt. Kadinprov Jatim, 2019)

Lebih lanjut, Rawls mengatakan bahwa persamaan distribusi nilai-nilai sosial primer ini memberikan suatu lukisan tentang kondisi hipotetis ideal, yakni kondisi di mana nilai-nilai sosial primer dapat dibagi dengan sama kepada semua orang, tanpa terkecuali. Melalui pemerataan sekolah unggul, pemerintah berupaya untuk menciptakan prinsip equality dalam setiap implementasi sistem zonasi. Dengan ini, hakikat masyarakat ideal sebagai masyarakat yang tidak ada kesenjangan dan ketidaksamaan dapat diwujudkan dalam bentuk yang nyata.

"... Karna kan memang maunya konsep keadilan dalam menempuh pendidikan itu kan ya siapa yang dekat dari sekolah itu sesuai dengan konsep keadilan dan kita ingin menghilangkan julukan sekolah favorite dan kita ingin pemerataan karena kan konsep pelayanan itu mendekatkan yang dilayani jadi kalau mau dilayani ya bangun sekolah disitu. Kalau bangun sekolah disitu ya orang situ bukan orang Australia, bukan untuk orang Medan, bukan untuk orang Bangkalan. Konsepnya kan gitu tapi cenderung orang itu pengennya masuk sekolah itu negeri, nah sekolah negeri itu kan kita tidak mencukupi. Padahal kan tidak ada jaminan kalau sekolah negeri itu pasti sukses dan berhasil ..."
(Wawancara Hudiyono plt. Kadinprov Jatim, 2019)

Kondisi sosial di atas dapat dijelaskan sebagai situasi di mana semua orang punya hak dan kewajiban yang sama, kebebasan dan kesempatan untuk dapat bersekolah di SMA Negeri dibagi sama rata. Kondisi ideal ini memberikan standar untuk menilai perbaikan kepada kehidupan sosial yang lebih baik. Jika ketimpangan dan ketidaksamaan distribusi nilai-nilai sosial primer justru membuat semua orang lebih baik daripada kondisi awal hipotetis ini, maka kondisi ini sejalan dengan tuntutan konsepsi keadilan umum melalui pemerataan sarana sekolah dengan proses pembangunan sekolah di setiap kecamatan. Harapannya ke depan tidak akan ada lagi

masyarakat yang mengeneralisir sebuah sekolah sebagai sekolah tanpa mutu karena pola penyebarannya sudah diratakan.

Dengan demikian, prinsip-prinsip keadilan umum ini belum memberi cukup petunjuk dalam mengatur distribusi nilai-nilai sosial primer yang adil. Karena itu, Rawls kemudian mengembangkan prinsip-prinsip umum ini lebih lanjut dengan penjabaran dan sistem prioritas dalam sebuah konsepsi keadilan sosial yang lebih khusus. Konsepsi khususnya ini dikembangkan dalam bentuk dua prinsip keadilan sosial, di mana hal ini termasuk bagian utama dari teori keadilan yang paling utama.

Konsepsi Khusus: John Rawls merumuskan konsepsi khusus keadilan ke dalam dua prinsip keadilan sosial yang dirumuskan sebagai berikut:

Prinsip Pertama:

“Each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for others.”

Konsepsi prinsip keadilan pertama ini disebut Rawls sebagai persamaan kebebasan-kebebasan dasar. Dalam hal ini Rawls menganut egalitarianisme yang berkenaan langsung dengan masalah kebebasan-kebebasan dasar warga masyarakat yang dimaksudkan oleh Rawls lain meliputi: a) *Political of liberty*, b) *freedom of speech and expression*, c) *freedom of conscience and thought*, d) *freedom to hold property*, e) *rule of law* (Rawls, 1999: 154-155).

Prinsip keadilan pertama ini mengatur agar kebebasan-kebebasan dasar ini diharuskan setara, karena warga suatu masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama. Kebebasan-kebebasan ini harus tersedia dengan cara yang sama untuk semua warga masyarakat.

“Prosentase itu sudah cukup mbak, karena kalau kita mengukur 20% yang diberikan oleh menteri itu kan ukuran awalnya dari nilai UNBK per tahun 2018 dimana untuk Jawa Timur prosentase nilai UNBK di atas 65 sudah mencapai angka 70% sehingga dalam implementasi zonasi kita diberikan jatah 20% khusus untuk jalur Nilai UN. Itu sudah sangat adil lho mbak.”
(Wawancara Bp. Wiharto Tekomdik Jatim, 2019)

Rawls di sini tidak berbicara tentang teori umum kebebasan, melainkan bagaimana prinsip keadilan dapat menjamin kebebasan-kebebasan dasar. Konsepsi kebebasan di sini berkaitan dengan kebebasan yang dipahami sebagai sistem aturan publik tertentu yang mendefinisikan hak dan kewajiban. Pemerintah sudah memberikan porsi 20% jalur pretasi akademik dengan harapan masing-masing provinsi dapat memaksimalkan porsi sesuai dengan azas keadilan dalam sistem zonasi PPDB SMA Negeri pada khususnya.

Hal penting yang harus diperhatikan ialah kebebasan (berpikir, suara hati, *person* dan sipil) atau apa yang disebut sebagai hak asasi tidak boleh dikorbankan untuk kebebasan politik dalam perumusan model sistem zonasi. Dengan kata lain, kebebasan dalam menentukan pilihan SMA harus didasarkan atas penghormatan terhadap kebebasan yang lebih dasar yakni masyarakat secara umum, dimana harus

ada keseimbangan dengan kebebasan suara hati. Pada konsepsi ini Rawls menyampaikan intuisi dan hati yang harus berjalan beriringan dengan rasionalitas dalam memutuskan suatu model sistem zonasi.

“kita kan di lapangan hanya mengikuti aturan yang ada, nah ini kan aturan beberapa kali ganti ya. Kita sendiri juga meraba-raba ada apa ya dengan sistem zonasi ini sampai berkali-kali mengalami perubahan. Sehingga kita itu merasa bingung, mana yang harus kita ikuti sedangkan perubahan selalu mendadak. Pokoknya ya kita ikuti saja mbak, informasi turun ya kita ikuti walaupun penerapannya kita jadi terkesan tergesa-gesa menginformasikan ke wali murid kelas 9 yang mau masuk ke SMA mbak.”

(Wawancara dengan Bu Endang Kepsek SMAN 1 Garum, 2019)

Implementasi model sistem zonasi harus berjalan beriringan sesuai tujuan utama pemerataan kualitas pendidikan sehingga ketika sampai pada pelaksana sistem harapannya dapat dilakukan secara maksimal agar tercapai prinsip *rule of law* (sebuah kebebasan dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah).

Lebih lanjut, Rawls menggarisbawahi bahwa kebebasan-kebebasan dasar harus dinilai sebagai satu kesatuan sistem yang bermakna kebebasan setiap orang tidak lepas begitu saja dari kebebasan orang lain dan juga suatu bentuk kebebasan tertentu tidak bisa dihayati dan dilaksanakan terpisah begitu saja. Apabila seorang siswa ingin masuk sekolah negeri maka ia berhak untuk itu dengan hak 20% dari keseluruhan siswa yang diterima.

Dengan kata lain, tuntutan untuk mendapatkan kebebasan dasar tertentu yang lebih luas tidak dapat diterima kecuali tuntutan atas kebebasan itu mampu membebaskan orang lain.

“Bagi anak rajin, pintar akan merasa rugi karena jarak rumah yang jauh akan kegeser dengan siswa yang biasa-biasa saja tapi jarak rumah dekat. menurut saya system zonasi hanya mengandalkan jarak rumah. Kalau ingin meratakan harus bersaing secara nilai sehingga kurang adil, jika mau meniadakan sekolah favorit seharusnya pemerintah meratakan sarana dan prasarana sekolah.”

(Wawancara siswa Nanda, 2019)

Menurut Rawls, pertimbangan di atas memperlihatkan bahwa betapa pun mendasarnya prinsip kebebasan bagi manusia, tetap saja ada kemungkinan untuk membatasi pelaksanaannya. Hal itu berarti bahwa tidak ada satu pun kebebasan bersifat absolut dari setiap bentuk kebebasan dasar atau dengan kata lain kebebasan dasar merupakan nilai fundamental bagi manusia sehingga wajib untuk diperjuangkan bersama.

Prinsip Kedua:

“Social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be to everyone's advantage, and (b) attached to positions and offices open to all...”

Prinsip keadilan sosial yang kedua berkenaan dengan masalah distribusi sumber daya sosial dan ekonomi dimana peneliti berfokus pada sumber daya sosial ranah pendidikan. Dalam konsepsi ini, Rawls menegaskan bahwa distribusi dalam bidang sosial boleh dibagi secara tidak sama (*unequality*) akan tetapi ketidaksamaan konsepsi ini harus memenuhi dua unsur berikut; (a) *attached to positions and offices open to all...* (b) *reasonably expected to be to everyone's advantage*. Sehingga dalam penerapannya diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang merasa terintimidasi dan terdiskriminasikan oleh sebuah model sistem zonasi yang pada tujuan utamanya yakni pemerataan kualitas pendidikan.

Lebih lanjut, Rawls mengidentifikasi prinsip kedua dalam teori keadilan sosial diidentifikasi sebagai *difference principle* yang kemudian menjadi salah satu bagian penting dalam teori keadilan sosial yang mana *difference principle* bisa diartikan sebagai bentuk jembatan antara konsepsi umum dan konsepsi khusus dari teori keadilan sosial yang terwujud dalam model sistem zonasi PPDB.

Prinsip keadilan sosial yang kedua ini merupakan solusi dan jawaban Rawls atas masalah persamaan kesempatan dalam keadilan distributif yang dianggap masih terlalu kaku apabila diterapkan dalam model sistem zonasi karena terbukti masih banyak keluhan yang muncul di masyarakat di mana perspektif yang ada selama ini dianggap tidak cukup memuaskan bagi masyarakat itu sendiri sehingga diperlukan bentuk upaya lain dari pemerintah dalam mengatasi keluhan yang muncul di masyarakat.

“ya memang anu mbak, seperti kita ini kan kita juga anggap baik mbak karena menghilangkan SMA favorite. Wong ini kan nanti juga bisa mengurangi angka kecelakaan karena tidak akan banyak anak yang lalu lalang di jalanan karena kan anak Talun harus ke Garum karena gak bisa sekolah di Talun. Tapi kalau ada penolakan ya wajar mbak kan ini hal baru di Blitar sini.”

(Wawancara Bu Endang Kepsek SMA Garum, 2019)

Perspektif Rawls atas masalah tersebut dengan digabungkannya prinsip persamaan kesempatan dengan prinsip perbedaan disebutnya sebagai perspektif kesamaan demokratis. Setidaknya, ada dua perspektif dalam menginterpretasi persamaan kesempatan yang ditolak olehnya. Pertama interpretasi kesamaan kesempatan formal dimana sebelum muncul sistem zonasi, kegiatan PPDB menggunakan NUN sehingga kesempatan formal sangat terbatas dan persamaan kesempatan fair sangat perlu untuk diperjuangkan.

Secara intuitif, prinsip persamaan kesempatan diterima sebagai justifikasi keadilan distributif bahwasanya setiap orang berhak menentukan pilihan hidupnya sendiri dan apa pun yang dicapainya tidak ada hubungannya dengan masalah keadilan apabila hal itu bukan karena keadaan melainkan karena pilihannya sendiri. Gagasan utama yang mendasari pandangan kesamaan kesempatan ialah, justru fair (keadilan) bagi individu-individu untuk menerima bagian yang tidak sama atas nilai-nilai sosial primer apabila nilai tersebut adalah hasil tindakan dan pilihan individu

yang memperjuangkan. Di sisi lain, tidak fair bagi individu-individu lain yang diuntungkan atau diistimewakan menurut perbedaan dalam keadaan sosial yang bersifat semena-mena dalam konteks ini ialah sistem zonasi tanpa uji coba dan minim sosialisasi.

“ya ada, hanya saja pada tahun ini sangat kurang sosialisasi waktunya sangat mepet dan masyarakat sangat kurang informasinya. Aturan itu sering sekali berubah, artinya pemprov Jatim sering mem-*break down* lagi tapi ya gitu lagi, maunya sama semua dan jadi kita juga gak bisa maksimal dalam ranah sosialisasi. Intinya tahun ini terlalu mepet waktunya sehingga kita gak berani mendahului aturan mbak”

(Wawancara dengan Bpk. Rudi Hartono Kepsek SMAN 3 Blitar, 2019)

Rawls mengakui daya pikat pandangan ini. Tetapi ada sumber ketimpangan yang tidak semestinya yang lain yang diabaikan oleh pandangan ini. Benar bahwa ketimpangan sosial adalah tidak semestinya, dan karena itu tidak fair jika nasib seseorang menjadi lebih buruk gara-gara ketimpangan tidak semestinya itu.

“kan gini zonasi itu kan kalau digambarkan bisa pakai jangka melingkar, pasar SMA 4 Blitar itu kan sebenarnya dari Sanankulon dan Kanigoro. SMA 4 Blitar ini kan dekat dengan kabupaten apabila ditarik jangka. Sanakulon itu dekat dengan SMA 4 Blitar tapi karena kuota sangat terbatas akhirnya wali murid banyak yang kecewa karena Sanankulon harus ke Ponggok karena kuota yang dimiliki SMA 4 sangat sedikit.”

(Wawancara Bp. Sutrisno Kepsek SMAN 4 Blitar, 2019)

Difference prinsiple tidak membenarkan keunggulan sosial maupun kemujuran kodrati sebagai sebuah keadilan mutlak. Hal ini harus dipandang sebagai karunia alami dan manusia tidak berhak mengubah atau mencampurinya sehingga keadilan sosial itu merupakan sebuah bentuk hak atas kebebasan dan kesempatan yang harus berjalan beriringan. *Difference principle theory* menganggap bahwasanya kelebihan genetis jangan lagi dianggap sebagai aset pribadi melainkan harus dipandang sebagai aset bersama. Setiap keuntungan yang berasal dari kelebihan alami/ genetis, nilainya ditentukan oleh apakah keuntungan semua golongan terutama mereka yang paling lemah. Dengan ini Rawls mengangkat solidaritas sosial sebagai salah satu kriteria masyarakat berkeadilan sosial.

SIMPULAN

Demonstrasi yang terjadi di Wilayah Blitar Raya sebagai bentuk usaha dalam memperjuangkan *equality* dimana dalam konsepsi umum *statement*, “*each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for others*” mengarah pada bentuk keadilan sosial yang diupayakan pemerintah melalui penambahan kuota pada jalur sistem zonasi yang hal ini merupakan bentuk dari *freedom of conscience and thought* sehingga masyarakat selalu memiliki kecenderungan untuk menyampaikan apa yang ada dipikirkannya apalagi hal tersebut berkaitan dengan pemilihan sekolah lanjut untuk anaknya.

Sekolah Menengah Atas di Blitar Raya merupakan satu dari seluruh SMA yang mulai menerapkan model sistem zonasi dalam jalur Penerimaan Peserta Didik Baru. Dimana dalam pelaksanaannya masih menemukan beberapa permasalahan yang kemudian perlu untuk dikaji lebih jauh. Permasalahan-permasalahan yang muncul akibat implementasi model sistem zonasi ini memang cukup banyak utamanya di Blitar Raya, seperti masih ditemukannya jual beli bangku (pada tingkat SMP) dan manipulasi data KK.

Model sistem zonasi mengacu pada tujuan awalnya sebagai upaya pemerataan kualitas pendidikan tentu menjadi angin segar bagi sistem pendidikan di Indonesia, namun apabila hal ini tidak dibarengi dengan kesiapan dari lembaga pelaksana dan masyarakat selaku sasaran utama tentu akan sulit dicapai. Perwujudan *equal liberty of principle* yang kemudian melebur dengan prinsip keduanya yakni *equal opportunity of principle* dimana kedudukan masyarakat disini bebas dalam mendapatkan segala haknya dan masyarakat dianggap memiliki kesempatan yang sama utamanya dalam memilih sekolah pada tingkat selanjutnya.

Hal penting yang perlu diperhatikan ialah bahwa kebebasan berpikir dan kebebasan suara hati, kebebasan *person* manusia dan kebebasan sipil, singkatnya apa yang kini dipahami sebagai hak asasi, tidak boleh dikorbankan untuk kebebasan politik dalam merumuskan model pendidikan sistem zonasi, untuk kebebasan kesamaan partisipasi dalam perumusan sebuah sistem. Dengan kata lain, kebebasan berpolitik harus didasarkan atas penghormatan terhadap kebebasan yang lebih dasar, yaitu kebebasan suara hati. Pada konsepsi ini Rawls menyampaikan intuisi dan hati yang harus berjalan beriringan dengan rasionalitas dalam memutuskan suatu model pendidikan sistem zonasi.

SARAN

Posisi peneliti disini sebagai pihak netral yang berupaya untuk mengurai jembatan keadilan sosial melalui model sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2019 dari perspektif John Rawls. Untuk itu peneliti berharap dalam jangka menengah pemerintah mampu menyusun kebijakan baru yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di daerah-daerah Wilayah Jawa Timur. Saran yang dapat peneliti berikan yakni:

- a. Pemerintah bekerja sama dengan Ombudsman mengurai kembali dampak positif dan negatif dari model sistem zonasi yang telah serentak dilaksanakan pada tahun 2019.
- b. Menteri Pendidikan melalui Kepala Cabang Dinas Wilayah harus berkomunikasi lebih intensif agar pelaksanaan sistem zonasi dapat berjalan optimal.
- c. Masyarakat perlu untuk disosialisasikan kembali secara berkala tujuan utama serta jalan yang harus ditempuh untuk mewujudkan model sistem zonasi yang bernafaskan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- , 1993. *Political Liberalism*. New York: Columbia University Press
- , 2001. *Justice as Fairness: A Restatement*, Erin Kelly (ed). Cambridge: Harvard University Press.
- Alfiyah, Hanik Yuni. 2002. "Ibnu Khaldun dan Tafsir Sosial" dalam *Jurnal Paramedia*, vol. ke-7, No. 2, April 2006, h. 6
- Christman, John. *Social and Political Philosophy: A Contemporary Introduction*, London: Routledge.
- Ardhi, Mohammad. 2015. "Evaluasi Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Real Time Online Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta"
- Badau, K. M., & Yahya, S., A. (2017). Assessing the Success of School Cluster Zoning System in Senior Secondary Schools of Adamawa State, Nigeria. *The Journal of Middle East and North Africa Sciences*, 3(4), 1-7]. (P-ISSN 2412-9763) - (e-ISSN 2412-8937). www.jomenas.org.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Coleman, J. (1968). The Concept of Equality of Educational Opportunity. *Harvard Educational Review*, 38(1), 7–22. Retrieved from <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED015157.pdf>
- Cresswell, John W. 2009. *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California : Sage Publications.
- Cresswell, John W. 2018. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset : Memilih di antara Lima Pendekatan Edisi ke 3*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Daniels, Norman (ed). 2007. *Reading Rawls: Critical Studies on Rawls A Theory of Justice*, New York: Basic Books, 1980. Graham, Paul. Rawls. Oxford: Oneworld.
- Gewertz, Ken. 2003. "John Rawls, Influential Political Philosopher Dead at 81", artikel diakses pada 1 Oktober 2019 dari <http://www.news.harvard.edu/gazette/2002/11.21/99-rawls.html> Ginsberg, Morris. Keadilan dalam Masyarakat. Yogyakarta: Pondok Edukasi.
- Kaelan. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kemdikbud. (2013). *Indikator Pendidikan di Indonesia 2012/2013*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. *Ikhtisar Data Pendidikan tahun 2016/2016*. Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- Kymlica, Will. 2004. Pengantar Filsafat Politik Kontemporer: Kajian Khusus atas Teori-Teori Keadilan. terj. Agus Wahyudi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kymlica, Will. 2004. Pengantar Filsafat Politik Kontemporer: Kajian Khusus atas Teori-Teori Keadilan. terj. Agus Wahyudi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lincoln, Yvonna S. Dan Denzin, Norman K. 2005. *The Sage Handbook Of Qualitative Research* Third edition. California : Sage Publications Inc
- Lynch, K., & Baker, J. (2005). Equality in Education: An Equality of Condition Perspective. *Theory and Research in Education*, 3(2), 131–164. Retrieved from <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1477878505053298>
- Mandle, Joe. 2009. Rawls's 'A Theory of Justice' an Introduction. New York: Cambridge University Press.
- Miller, David. 2001. *Principles of Social Justice*. London: Harvard University Press, 1999. Oneil, Onora. "Catatan Sederhana Tentang Etika Kant", dalam Etika Terapan I, ed. Lary May, dkk, terj. Sinta Carolina, dkk, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Neuman, W. Lawrence. 2014. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches Seventh Edition*. Amerika : Pearson.
- Neuman, W. Lawrence. 2016. *Metodologi Penelitian Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi 7*. Jakarta Barat : PT Indeks.
- Pogge, Thomas. 2006. John Rawls: His Life and Theory of Justice, trans. Michelle Kosch, New York: Oxford University Press, 2007. Rawls, John, Teori keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara. terj. Uzair Hamzah dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rasuanto, Bur. 2005. Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern, Jakarta: Gramedia,
- Rawls, John. 1995. *A Theory of Justice*. Cambridge, Massachussetts: Harvard University Press.
- Rawls, John. 2006. *Teori keadilan*. Terjemahan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasteyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Riant Nugroho, 2015. *Kebijakan Publik di Negara Negara Berkembang*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar
- Ritzer, George. 2011. *Sociological Theory*. New York: McGraw-Hill Companies, Inc. 8th ed.
- Ritzer, George. 2012. *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Posmodern*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

- Ritzer, George. 2016. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Depok: Raja Grafindo Persada
- Russel, Bertrand. 2004. *Sejarah Filsafat Barat: Kaitannya dengan Kondisi Sosio-Politik Zaman Kuno Hingga Sekarang*, cet. Ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ujan, Andre Uta. 2005. *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls*, cet.ke-5, Yogyakarta: Kanisius.
- Veger, K.J. 1986. *Realitas Sosial. Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*. Jakarta: Gramedia.
- Waters, Malcolm. 1994. *Modern Sociological Theory*. London: SAGE Publications Ltd.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik Teori. Proses dan Studi Kasus*. Center of Academic Publising Service: Jogjakarta.
- Yin, Robert, K. 2009. *Case Study Research: Design and Methods*. London: SAGE Publications Ltd. Second Ed.
- Young, Patricia C. 1962. *The sociology of Emile Durkheim*. Honors Theses.
- Zulkarnain, Umar. 2017. Analisis Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Untuk Peningkatan Kualitas Layanan Publik Di Daerah, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Makassar, *Jurnal Analisis dan Kebijakan Publik Volume 3 Number 1 Juni 2017*.

<http://www.ombudsman.go.id> diakses pada tanggal 20 Agustus 2019